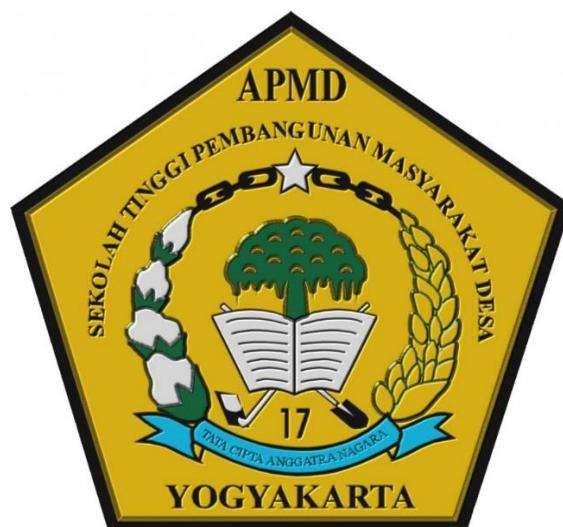


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa di
Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang)

TESIS



Disusun Oleh :

NATALIA

23610040

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA

2025

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa di
Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang)



PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa di
Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang)

Natalia

23610040

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Pengaji Tesis

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

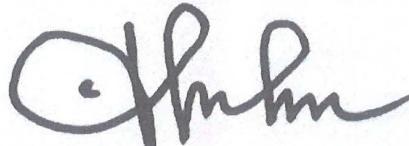
Telah disetujui pada 17 Juni 2025

dan dinatakan telah memenuhi syarat lulus

Panitia Pengaji Tesis

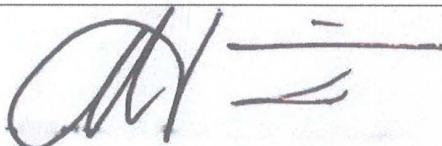
Pembimbing/Ketua Tim Pengaji

Dr. Supardal M.Si



Pengaji I

Dr. R Widodo Triputro, M.M., M.Si.



Pengaji II

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.,
M.Si.



Mengetahui

Direktur Program Magister



HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang)

Natalia

23610040

Telah disetujui pada 4 Juli 2025

Susunan Tim Penguji

Pembimbing/Ketua Tim Penguji

Dr. Supardal M.Si



Penguji I

Dr. R Widodo Triputro, M.M., M.Si.



Penguji II

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

Mengetahui

Direktur Program Magister

Ilmu Pemerintahan



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NATALIA

NIM : 23610040

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya susun dan tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sejauh pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pernah dituliskan dan diterbitkan orang lain, kecuali disebutkan dalam daftar pustaka dibagian akhir penelitian ini.

Yogyakarta, 12 Juni 2025



NATALIA

MOTTO

1 KORINTUS 10:7

Percobaan-Percobaan Yang Kamu Alami Iyalah Percobaan Biasa,Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia. Sebab Allah Setia Dan Karena Itu Ia Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan

(Yeremia 29:11)

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

(1 Korintus 15:58)

"Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa syukur yang tak terhingga, Tesis ini saya persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Bunda Maria, sumber kekuatan, pengharapan, dan kasih yang tak terbatas. Di setiap langkah yang berat Tuhan senantiasa hadir memberikan damai, menuntun langkah, serta membuka jalan ketika semuanya terasa buntu. Segala yang terjadi hingga tercapainya titik ini bukan semata karena kekuatan penulis, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang bekerja begitu nyata. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa.
2. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Tiap dan Ibu Simicui yang selalu menjadi pilar kekuatan dan cinta sejati dalam hidup saya. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah henti, yang telah kalian curahkan demi masa depan anakmu. Terima kasih atas kasih yang tak tergantikan, atas semangat yang kalian berikan meskipun dalam diam. Tidak ada kata yang cukup mampu menggambarkan betapa besar peran kalian dalam hidup saya.
3. Kepada kedua adik kandung saya, Subranto Dan Pranja. Terima kasih karena telah menjadi cahaya dan kekuatan di setiap langkah hidup ini. Engkau adalah sosok yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka, walau terkadang suka iseng terhadap saya tapi kalian selalu membuat saya banga akan pencapaian-pancapain yang telah kalian berikan. Kehadiran kalia adalah kekuatan yang tak tergantikan.
4. Kepada keluarga besar saya, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang selalu hadir dan mendukung saya. Dari kalian, saya belajar tentang arti kebersamaan, ketulusan, dan kekuatan dalam kesederhanaan.

5. Kepada diriku sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah. Di balik semua rasa lelah dan ragu, kamu tetap memilih untuk melangkah satu hari demi satu hari. Perjalanan ini tidak mudah, penuh tekanan, tantangan, dan pergulatan batin. Tapi kamu mampu melewatkinya dengan kepala tegak dan hati yang tetap utuh. Bukan karena kamu selalu kuat, tapi karena kamu memilih untuk terus bangkit setiap kali terjatuh.
6. Kepada seluruh informan yang telah membantu meberikan data, informasi kepada peneliti.
7. Sahabat terbaik Jhosephin Virani Triani Rahail, yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dalam proses perkuliahan hingga dalam penyusunan tugas akhir ini semoga kita sama-sama sukses kedepan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Semantun Jaya Kabupaten ketapang)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, keberhasilan dalam penyusunan Tesis ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” .
2. Kepada Dosen pembimbing Tesis saya Pak Dr. Supardal, M.Si, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalam, karena telah membimbing, mengarahkan dan membantu dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dosen Penguji I. Dr.R Widodo Triputro, M.M.,M.Si yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.
4. Bapak Dosen Penguji II. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, dan Bapak Yohanes, Deni, dan Roman sebagai Pegawai tata usaha Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang telah memberikan ilmuilmu dan yang telah banyak membantu dalam hal memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran pembuatan Tesis dan penyelesaian Studi Magister Ilmu Pemerintahan.

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan sepenuh hati menerima segala masukan, baik berupa saran maupun kritik yang konstruktif, yang dapat membantu dalam perbaikan dan pengembangan tesis ini ke arah yang lebih baik.

Yogyakarta, 2025

Natalia

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	6
C. Fokus Penelitian	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
F. Kerangka Konseptual	15
BAB II METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Objek Penelitian	21
C. Lokasi Penelitian	21
D. Tehnik Pemilihan Informan	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Validasi Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB III PROFIL DESA SEMANTUN, KECAMATAN JELAI HULU,.....	30
KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT	30

A. Sejarah Desa Semantun.....	30
B. Visi dan Misi	30
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semantun Jaya.....	32
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	37
E. Potensi Desa Semantun	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.....	45
1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.....	45
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	49
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil.....	53
4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dokumen perencanaan pembangunan	56
B. faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Semantun Jaya.....	61
BAB VPENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
C. Kelemahan Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82
PANDUAN WAWANCARA 4.1	82
2. Foto-Foto hasil Wawancara	84
3. Surat Balasan Penelitian Dari Desa Semantun Jaya	86

DAFTAR TABEL

Tabel Informan 1.1.....	22
Tabel 3. 5 Tingkat Pendidikan	38
Tabel 3. 6 Indikator Kesehatan	39
Tabel 3. 7 Pertumbuhan Penduduk	39
Tabel 3. 8 Pertumbuhan Angkatan Kerja.....	41
Tabel 3. 9 Kategori Kemiskinan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Desa Semantun Jaya	34
Gambar 3. 4 Grafik Jumlah Penduduk.....	36

INTISARI

Pembangunan desa memegang peranan strategis dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih tergolong rendah. Hal ini juga terjadi di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Masih terbatasnya partisipasi warga dalam proses musyawarah desa serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah desa menjadi persoalan utama yang diangkat dalam penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami partisipasi yang terjadi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta menganalisis sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan yang sejati dan memperkuat tata kelola desa yang menjadi bagiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih tergolong Kurang masimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya pendidikan, minimnya akses informasi, dan persepsi negatif terhadap kepemimpinan desa. Meskipun demikian, terdapat potensi keterlibatan yang lebih aktif jika didukung oleh kepemimpinan desa yang transparan dan inklusif, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Proses musyawarah desa yang terbuka dapat menjadi kunci utama untuk menghidupkan kembali peran serta warga.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, pembangunan desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes),

ABSTRAK

Village development plays a strategic role in strengthening the social and economic structure of local communities. Since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages have been given broader authority to regulate development based on community participation. However, in practice, community involvement in village development planning is still relatively low. This also occurs in Semantun Jaya Village, Jelai Hulu District, Ketapang Regency, which is the focus of this study. The limited participation of residents in the village deliberation process and low trust in the village government are the main issues raised in the study. This type of research is qualitative descriptive research. Through this approach, researchers seek to understand the social dynamics that occur in the process of preparing the Village Government Work Plan (RKPDes), and analyze the extent to which the community plays an active role in determining the direction of development.

The results of the study are expected to contribute to the village government in increasing community participation as a true subject of development and strengthening village governance which is part of it. The results of the study show that community participation is still relatively low, especially at the planning stage. This is caused by several inhibiting factors, such as low education, minimal access to information, and negative perceptions of village leadership. However, there is potential for more active involvement if supported by transparent and inclusive village leadership, as well as ongoing guidance to the community. An open village deliberation process can be the main key to reviving community participation.

.

Keywords: Community participation, village development, Village Government Work Plan (RKPDes),

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan aspek yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Desa tidak hanya menjadi entitas administratif terkecil, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membentuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa memegang peranan penting dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep pembangunan desa tidak lagi dipandang sebagai pelengkap dari pembangunan kota, tetapi justru menjadi titik tolak untuk memperkuat kemandirian bangsa dari bawah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa telah mengalami perubahan besar. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan nilai-nilai adat istiadat. Melalui kebijakan ini, desa diberikan keleluasaan untuk merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal, baik dari segi sumber daya alam, sosial budaya, maupun kapasitas kelembagaan. Pemerintah desa menjadi motor utama penggerak pembangunan, dan masyarakat desa menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan yang mereka butuhkan.

Dalam praktiknya, pembangunan desa mencakup berbagai bidang, antara lain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi; pembangunan sosial seperti pendidikan dan kesehatan; serta pengembangan ekonomi lokal melalui usaha mikro, pertanian, dan

sektor informal. Selain itu, pembangunan desa juga menyentuh aspek lingkungan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak bisa dipandang secara sempit hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan harus dilakukan secara integratif, partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Agar pembangunan desa dapat terarah dan terencana dengan baik, maka dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis. Dalam hal ini, desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai penjabaran tahunan dari RPJMDes. Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan desa setiap tahunnya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses penyusunan dokumen perencanaan ini harus melibatkan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), yang menjadi wahana bagi warga untuk mengidentifikasi permasalahan, mengusulkan kebutuhan, dan merumuskan solusi pembangunan.

Namun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan desa. Di antaranya adalah belum optimalnya perencanaan berbasis data yang akurat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, lemahnya pengawasan, serta masih minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Banyak desa yang masih cenderung menjalankan program pembangunan secara top-down, tanpa melalui proses konsultasi dan musyawarah yang memadai. Akibatnya, program yang dilaksanakan seringkali tidak sesuai

dengan kebutuhan nyata masyarakat, atau bahkan menimbulkan konflik dan ketimpangan sosial.

Di sisi lain, pembangunan desa juga harus selaras dengan semangat demokrasi dan desentralisasi. Demokratisasi pembangunan desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan desanya sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan, karena hanya melalui keterlibatan aktif masyarakatlah, pembangunan desa dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pembangunan desa juga harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, struktur sosial budaya, dan kondisi geografis yang unik di masing-masing wilayah. Setiap desa memiliki kekhasan tersendiri yang tidak bisa diseragamkan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang diterapkan pun harus bersifat kontekstual, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika lokal. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga desa lainnya harus mampu menggali potensi lokal serta memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, pembangunan desa menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji. Desa ini memiliki potensi yang cukup besar baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dikarenakan masyarakat engan untuk berpartisipasi atau terlibat karena mereka sudah kecewa dengan

pemimpin desa yang di mana mereka selalu mengutamakan keluarga sendiri dibanding masyarakat yang lain, contoh setiap ada pembangunan desa pasti yang mengambil alih proyek desa selalu dari pihak keluarga dari kepala desa jadi ini menjadi sebab utama masyarakat engan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk membangun sistem perencanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang pembangunan desa, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Metode pengelolaan tata ruang desa itu sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Perwujudan hak dan tanggung jawab warga sebagai pelaku utama pembangunan merupakan langkah penting dalam proses tersebut. Dalam perencanaan tata ruang desa, hak-hak warga meliputi hak atas ruang untuk bersosialisasi, mengembangkan ide dan karya, serta hidup sebagai keluarga.

Dalam hal keterlibatan, masyarakat berhak untuk memberikan kontribusi langsung dalam pemetaan sumber daya, potensi, dan kondisi sosial desa. Untuk mencapai perencanaan pembangunan desa yang diinginkan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk menjalankan proses ini. Mendorong hak masyarakat ini merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan rasa bangga terhadap rencana dan inisiatif yang dihasilkan.

Untuk itu, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dengan sungguh-sungguh. (Magdalena Lenama, 2021). Strategi memiliki dampak yang bersifat multidimensi dan multifungsi, sehingga memerlukan pertimbangan

yang matang terhadap faktor internal maupun eksternal organisasi. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dapat berupa hal-hal yang mendorong atau justru menghambat pelaksanaan suatu kegiatan.

Pembangunan yang efektif menerapkan prinsip perencanaan partisipatif, di mana keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai proses yang menyangkut kepentingan publik menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan (Hafrida et al., 2023) bahwa pemerintah harus melakukan pembinaan terhadap masyarakat, dimana masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Desa, sejumlah pertimbangan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penataan desa harus mengikuti prinsip-prinsip penataan desa untuk melestarikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat serta mewujudkan cita-cita nasional Pancasila dan UUD 1945.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa memerlukan peraturan desa.
- c. Tata kelola pemerintahan desa yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan desa harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi aktif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan RKPDes sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat pendidikan. Dalam forum musyawarah, diperlukan kemampuan yang baik untuk memberikan argumentasi atau pendapat, sehingga suasana dalam

forum terlihat lebih aktif. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat cenderung lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasannya.

Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dan mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pemerintah desa di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan kesejahteraan masyarakat melalui program RKPDes.

B. Kajian Literatur

Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Desa dalam Rangka Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat pada Program RKPDES di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, bukanlah satu-satunya penelitian di bidang itu. Ada Peneliti lain yang juga melakukan penelitian sebidang. Peneliti-peneliti tersebut adalah :

1. Penelitian *Pertama*, (Rizand Fadjar Muhammad, MZ. Arifin, 2022) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau” Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, menjadi fokus penelitian ini.

Topik utama penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hasil, penilaian, dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini. Kepala Kampung Labanan Makarti merupakan sumber

informasi utama dalam studi ini. Wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi adalah metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan hasil temuan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur belum berjalan dengan baik di Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Masyarakat berpartisipasi dengan sangat baik dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi mereka tidak peduli dengan pemeliharaan hasil pembangunan dan hanya mengandalkan anggaran desa. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proses evaluasi. Usia dan kesadaran merupakan faktor pendukung, namun kesibukan dan pendidikan merupakan faktor penghambat. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp> (18 Januari 2025)

2. Peneliti kedua, Samaun Riyanti (2022) dengan judul Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah: 1) memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang kepedulian lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, 2) membangun kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha ternak sapi dari pemerintah desa, dan 3) membina proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: 1) faktor pendukung upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu adanya keterbukaan dan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan serta sikap kerjasama masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, 2) faktor penghambat upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berasal dari pemerintah sendiri yang kurang mampu mempertanggungjawabkan pelaporan penggunaan keuangan desa sehingga pemberian pembangunan desa terhambat, dan sikap ketidakpedulian masyarakat dalam memandang pembangunan desa tidak penting, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oluhuta sebagian besar masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

<https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18> (18 Januari 2025)

3. Penelitian Ketiga, Dewa Putu Bagus Pujawan Putra (2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata carangsari Gustiman Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis partisipasi

masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Pengumpulan data

4. a dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur dan Focus Group Discussion dengan pemerintah Kabupaten Badung, tokoh masyarakat Desa Wisata Carangsari, akademisi, dan praktisi di bidang desa wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat adalah consultation dengan sifat semu dan pasif, masyarakat minim partisipasi dan hanya memperoleh manfaat ekonomi. Faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi pemahaman desa wisata, badan pengelola desa wisata, sumber daya manusia, dan pemetaan produk unggulan desa, sementara faktor eksternal berupa kajian desa wisata, sumber dana dan program pemberdayaan masyarakat serta pemasaran. Saat ini, model partisipasi masyarakat mengarah pada topdown. Sementara itu, metode alternatif menawarkan gagasan agar masyarakat bersama pemerintah dan akademisi turut berpartisipasi mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata alam dan budaya yang dikelola Badan Pengelola Desa Wisata. Harapannya dengan begitu mampu bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi, revitalisasi budaya lokal, dan konservasi lingkungan. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah tidak semua desa wisata memiliki masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap desa wisata.

<https://scholar.archive.org/work/wmjd54jgcjcjtelpuwywm5a2m4/access/wayback>, (18 Januari 2025)

5. Penelitian Keempat Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Desa di Indonesia diindiktekan pusat dengan kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya, demikian juga dengan Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur, dimana kearifan lokal dalam bentuk partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut sudah mengalami penguraian, oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif, dimana informan penelitian adalah kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta sebagian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sinsingon Barat dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih tergolong rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16194>(18 Januari 2025)

6. Penelitian Ke Lima Desa Ciakar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran: Studi Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Hamdan Maosul, Erlan Suwarlan & Budiawan, 2021). Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam memilih program

pembangunan, kurangnya inisiatif dalam memberikan ide dan usulan, serta keengganan untuk meluangkan waktu dalam pembangunan desa menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dan deskriptif. Sumber data primer terdiri dari sebelas informan. Data dikumpulkan melalui survei literatur dan penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan desa tahun 2021 di Desa Ciakar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, belum tentu menguntungkan penduduk setempat. Tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya keberanian masyarakat, kesenjangan informasi, kurangnya pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat, kurangnya kesadaran, kurangnya pendapatan, beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi, menipisnya rasa solidaritas, sikap individualis, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Masyarakat telah diajak untuk berkolaborasi, inisiatif pembangunan sosial telah dibangun, dan kesempatan kerja telah dibuka dan disediakan untuk masyarakat.

<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2284> (25Januari 2025)

7. Penelitian KeEnam Dalam publikasi tahun 2023 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran,” Jenal Arifin dan Wawan Risnawan meletakkan dasar untuk penelitian ini. Anggota masyarakat kurang memiliki sumber daya manusia yang memadai, kurang mampu berkomunikasi, kurang percaya diri untuk

menyuarkan pendapat dan saran secara terbuka, dan dengan demikian tidak dapat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait program-program pembangunan. Penelitian ini mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.

Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, delapan informan diwawancara. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan kombinasi penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum membantu pembangunan desa di Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Dua dari empat dimensi yang dievaluasi jelas berfungsi dengan baik, yaitu keterlibatan dalam melacak dan menilai pertumbuhan dan keterlibatan dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Dua aspek lainnya, yaitu keterlibatan dalam mengambil keputusan dan keterlibatan dalam melaksanakan kegiatan, juga belum berjalan dengan baik atau masih rendah.

<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3960> (25 Januari 2025)

8. Penelitian KeTujuh dari Erna Hendrawati (2020) dengan judul Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana desa. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden adalah perangkat desa, BPD dan perwakilan masyarakat didesa Setro, kecamatan Menganti Gresik. Teknik pengolahan data dengan editing, dan interpretasi. Partisipasi RPJMDesa dan RKPDesa, musyawarah

perencanaan pembangunan desa melibatkan perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, RT,RW, kepala dusun. Transparansi, adanya mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat, mengajukan tanggapan, kritik terhadap pemerintahan desa, dokumen RKPDesa Setro sebagai dasar penyusunan APBDesa. Akuntabilitas, RPJMDesa sebagai acuan dan arah perencanaan penyusunan RKPDesa, dokumen RKPDesa dasar penyusunan APBDesa. Partisipasi APBDesa Setrotahun 2017, musyawarah antara tim Penyusun APBDesa dengan BPD, LPMD sebagai perwakilan masyarakat. Transparansi APBDesa Setro, dibuat banner informasi di lokasi pelaksanaan program pembangunan. Akuntabilitas APBDesa Setro, penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/3113> (25 Januari 2025)

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan saya laksanakan iyalah:

1. Pembangunan infrastruktur desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi, menurut penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian saya akan lebih fokus pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik yang diarahkan pada percepatan kesejahteraan masyarakat dalam Program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). Oleh karena itu, penelitian saya terfokus pada aspek kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat secara holistik, bukan hanya pada infrastruktur fisik.
2. Tujuan Penelitian: Sementara penelitian saya bertujuan untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di

Semantun Jaya dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, Penelitian sebelumnya berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dan mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukungnya. Penelitian Saya lebih berorientasi pada proses demokrasi partisipatif yang berupaya memastikan keterlibatan masyarakat aktif dalam setiap tahap kebijakan perencanaan.

3. Metode Pengumpulan Data dan Analisis: Meskipun penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sama, penelitian Saya mungkin akan mengumpulkan pengumpulan data terkait proses musyawarah desa dan rapat-rapat formal lainnya di mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian Saya akan mencakup analisis aspek tentang seberapa efektif kebijakan yang diambil dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan menilai partisipasi masyarakat dalam konteks peningkatan kesejahteraan.
4. Hasil yang diharapkan: Penelitian terdahulu menekankan pada hasil fisik seperti kualitas infrastruktur dan efektivitas pemeliharaannya. Sebaliknya, penelitian Saya fokus pada dampak pengambilan keputusan bersama dalam kebijakan Desa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, keluaran penelitian Saya diharapkan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik pada kebijakan partisipatif dan strategi peningkatan kesejahteraan melalui RKPDES.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi pembangunan di Desa Semantun Jaya, Kabupaten Ketapang.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana Faktor Pendukung Dan penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencana Pembangunan Desa Di Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menarik tujuan penelitian yaitu Ingin mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Perencana Pembangunan Desa Di Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang.

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang.
2. Mengetahui Dampak dan kendala-kandala yang dihadapi Masyarakat Pada Keberhasilan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Semantun Jaya Kabupaten Ketapang!

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka peneliti menarik manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Kontekstual: Penelitian ini akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat..
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini membantu pemerintah desa dalam mereformasi program kebijakan dan tata kelola pembangunan desa agar lebih berfokus pada desa daripada pemerintah.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada konsep utama tentang pembangunan desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus pelaku utama dalam setiap proses pembangunan. Dalam perspektif pembangunan

partisipatif, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi menjadi penggerak pembangunan berbasis lokal. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus dibangun secara inklusif, terbuka, dan partisipatif.

Konsep dasar dari pembangunan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam kerangka ini, desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai panduan pembangunan jangka menengah selama enam tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai rencana tahunan yang dijabarkan dari RPJMDes. Kedua dokumen ini menjadi alat penting dalam memastikan arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menjadi unsur yang sangat penting dalam konsep ini. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan usulan program, pelaksanaan musyawarah desa, hingga proses pengawasan. Teori partisipasi dari Cohen & Uphoff (1977) menjadi acuan utama dalam penelitian ini, yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan, khususnya pada tahap perencanaan. Bentuk partisipasi ini mencerminkan sejauh mana warga dilibatkan dalam proses musyawarah atau forum formal, seperti musyawarah desa (Musdes),

guna menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, dan ikut menyepakati keputusan yang akan diambil. Partisipasi ini penting karena mendorong rasa memiliki terhadap program pembangunan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan desa.

partisipasi dalam pelaksanaan merujuk pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menjalankan dan merealisasikan program atau kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Bentuk partisipasi ini bisa berupa sumbangan tenaga (swadaya tenaga), materi, uang, atau pemanfaatan sumber daya lokal lainnya. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab bersama atas hasil kegiatan. Partisipasi dalam pelaksanaan juga membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan mempercepat proses pembangunan karena masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan di lapangan.

partisipasi dalam pemanfaatan hasil adalah keterlibatan masyarakat dalam menggunakan, menjaga, dan mengambil manfaat dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan, serta menunjukkan kesediaan mereka untuk memelihara dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas atau program yang telah dibangun, seperti jalan desa, sarana air bersih, atau fasilitas pendidikan. Dengan terlibat dalam pemanfaatan hasil, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga turut bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan dan fungsi

dari hasil pembangunan tersebut agar dapat digunakan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menilai dan memberikan masukan terhadap proses serta hasil dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Keterlibatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan rencana, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui partisipasi dalam evaluasi, masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun pengalaman langsung yang menjadi bahan perbaikan bagi perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi partisipatif membantu menciptakan proses pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi demokrasi desa, di mana proses pembangunan harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berbasis musyawarah mufakat. Demokrasi desa menjadi pondasi penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial. Tanpa adanya demokratisasi di tingkat lokal, maka partisipasi masyarakat hanya akan menjadi formalitas belaka.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana Desa Semantun Jaya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan melalui program RKPDes, bagaimana pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dengan kerangka ini, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara

perencanaan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara nyata. Oleh sebab itu penelitian semacam ini mempunyai dasar empiris yang bersandar pada teori Partisipasi Masyarakat, dan teori Pembangunan Desa Berdasarkan Latar belakang diatas maka Kerangka Konseptual dibawah ini :

Berikut adalah beberapa indikator utama yang digunakan Teori partisipasi dari Cohen & Uphoff (1977) menjadi acuan utama dalam penelitian ini, yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi untuk menilai partisipasi masyarakat:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. partisipasi dalam pelaksanaan.
3. partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari indikator dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes) menjadi indikator penting, karena mencerminkan sejauh mana warga mengikuti proses awal perumusan program pembangunan. Di Desa Semantun Jaya, kehadiran warga dalam Musdes cukup baik secara jumlah, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kualitas partisipasi, sebab sebagian warga hanya hadir tanpa berani menyampaikan pendapat. Indikator berikutnya adalah pemberian usulan dan pendapat dalam forum perencanaan, di mana masyarakat seharusnya aktif menyampaikan kebutuhan dan aspirasi. Namun,

tidak semua usulan diakomodasi, sehingga sebagian warga merasa enggan memberikan pendapat karena merasa suaranya tidak didengar.

Sementara itu, dalam tahap pelaksanaan, indikator penting adalah keterlibatan warga sebagai tenaga kerja dalam proyek pembangunan atau swadaya tenaga. Di Desa Semantun Jaya, partisipasi tenaga kerja warga berjalan secara bergantian; terkadang tinggi, terutama saat proyek berdampak langsung bagi mereka, namun juga bisa menurun jika terjadi ketidakpuasan terhadap pimpinan desa, seperti anggapan bahwa pekerjaan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh rasa kepercayaan terhadap kepemimpinan desa dan keadilan dalam pembagian peran.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Persoalan yang dihadapi membutuhkan data yang komprehensif, menyeluruh, dapat dipercaya, dan relevan, menurut Sugiyono (2010:145); Ketika mempelajari fenomena yang hanya sedikit diketahui, maka digunakan pendekatan kualitatif; metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan fenomena secara jelas dan rinci; dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yang tidak melibatkan angka-angka dalam analisisnya, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan catatan-catatan tertulis.

B. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Semantun Jaya, Kabupaten Ketapang . Penelitian ini fokus pada bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan program, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa, serta faktor-faktor masyarakat yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut dalam rangka mempercepat kesejahteraan adalah fokus dari penelitian tesis ini.

C. Lokasi Penelitian

Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, antara lain, karena peneliti sebagai putri asli daerah ingin memberikan kontribusi untuk Pemerintah Desa Semantun Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang

dengan hasil penelitian ini nantinya, serta ini merupakan bentuk pengabdian peneliti terhadap masyarakat Desa Semantun Jaya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang khususnya kepada masyarakat Desa, semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi jembatan penghubung antara Masyarakat dengan Perangkat Desa agar bisa bekerjasama dengan baik dalam membangun Desa.

D. Teknik Pemilihan Informan

Individu atau entitas yang berfungsi sebagai sumber data utama dikenal sebagai subjek penelitian. Orang-orang yang diperkirakan memiliki keahlian, pengalaman, dan informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dipilih sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019: 81). Purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua individu di desa memiliki informasi yang mendalam terkait proses perencanaan pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Informan dari penelitian meliputi:

Tabel Informan 1.1

NO	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Umur
1	Y.Bircie Gelu Koban	SMA	Kepala Desa	40
2	Elysabeth	SMA	Sekertaris Desa	32
3	Kristo	SMA	Ketua BPD	25
4	Yusta Harianti	SMA	Kepala Dusun Pembangunan kinjil	35

5	Blasius Sudik	SD	petani	63
6.	Kartio	SMP	Petani	42
7	Lena	SMA	Ibu Rumah Tangga	40

Sumber: Data diolah 2025

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyajikan penjelasan metode pengumpulan data dengan sumber yang lebih baru, berikut adalah referensi berdasarkan prinsip-prinsip umum yang telah berkembang dalam penelitian:

a. Observasi

Jika Anda ingin mengecek ulang atau melengkapi data yang telah diberikan responden, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui observasi, yaitu mengamati peristiwa atau aktivitas kehidupan nyata. Menurut Creswell dan Poth (2018), observasi memungkinkan peneliti untuk secara langsung mencatat perilaku dan kondisi yang relevan dengan topik penelitian, sehingga memberikan data yang lebih kaya dan kontekstual.

Observasi yang dilakukan peneliti di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, bertujuan untuk memahami secara langsung tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui program RKPDes. Peneliti mengamati berbagai kegiatan musyawarah desa, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes), serta keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Selama observasi, peneliti mencatat bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum-forum desa masih tergolong rendah, ditandai dengan minimnya kehadiran warga dan kurangnya kontribusi aktif dalam

menyampaikan aspirasi. Melalui pengamatan langsung ini, peneliti juga mendalami interaksi antara perangkat desa dan masyarakat, serta sejauh mana informasi pembangunan disosialisasikan kepada publik. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pandangan Pribadi dalam Observasi Penelitian di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam proses observasi dan penelitian saya di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, saya menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tergolong rendah. Hal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan wawancara langsung dan pengamatan di lapangan, saya melihat adanya rasa kecewa yang cukup mendalam dari masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa saat ini.

Kekecewaan ini sebagian besar muncul karena adanya praktik yang dianggap tidak adil dalam pembagian pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan proyek pembangunan desa. Masyarakat mengeluhkan bahwa setiap kali ada proyek pembangunan seperti pembangunan jalan, irigasi, atau fasilitas umum lainnya yang mendapatkan pekerjaan utama selalu berasal dari kalangan keluarga atau kerabat dekat kepala desa. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proyek desa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan bersama.

Akibat dari kondisi ini, banyak warga yang memilih untuk bersikap pasif dalam kegiatan desa. Mereka merasa suara dan keikutsertaan mereka tidak lagi dihargai. Partisipasi dalam musyawarah

desa menurun, keterlibatan dalam gotong royong melemah, bahkan ada sebagian warga yang merasa enggan untuk mengikuti kegiatan pembangunan karena merasa sudah tidak memiliki tempat dalam proses pengambilan keputusan.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Padahal, semangat pembangunan desa yang berkelanjutan sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, jika rasa keadilan dan keterbukaan tidak ditegakkan, maka partisipasi masyarakat sulit untuk tumbuh secara alami.

Melalui observasi ini, saya menyadari bahwa untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera, dibutuhkan bukan hanya kebijakan dan program yang baik, tetapi juga kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika kepercayaan hilang, maka secanggih apapun program yang dibuat, tidak akan mendapat dukungan penuh dari warga. Harapannya, ke depan, ada perubahan pola kepemimpinan yang lebih transparan, adil, dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh tanpa diskriminasi, agar partisipasi warga dapat tumbuh kembali.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang sering digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memahami persepsi, pandangan, atau pengalaman dari informan. Sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2018), wawancara dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan detail mengenai subjek yang diteliti karena melibatkan diskusi yang terstruktur maupun bebas.

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Semantun Jaya dilakukan secara mendalam dan langsung kepada para informan yang dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap topik penelitian. Peneliti mewawancarai berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, anggota BPD, Kepala Dusun, serta warga masyarakat seperti petani dan ibu rumah tangga. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam program RKPDes. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka untuk memungkinkan informan menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara bebas dan mendalam, serta memperkuat data melalui teknik triangulasi dengan observasi dan dokumentasi guna memastikan validitas temuan.

Dalam pelaksanaan penelitian di Desa Semantun Jaya, saya melakukan wawancara dengan pendekatan yang lebih informal dan komunikatif, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat setempat. Mengingat rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) serta minimnya pengetahuan sebagian besar warga maupun perangkat desa mengenai pentingnya pembangunan desa, saya memilih metode wawancara semi-struktural yang bersifat terbuka dan fleksibel.

Sebelum memulai wawancara, saya terlebih dahulu melakukan pendekatan personal kepada narasumber, baik warga biasa maupun perangkat desa. Pendekatan ini dilakukan dengan cara berinteraksi dalam kegiatan harian warga seperti nongkrong di warung kopi, mengikuti

kegiatan keagamaan, maupun berkunjung ke rumah secara langsung. Saya sengaja tidak langsung menggunakan bahasa formal penelitian, melainkan lebih mengedepankan percakapan sehari-hari agar narasumber merasa nyaman dan tidak tertekan.

Wawancara saya lakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman narasumber. Saya menghindari istilah-istilah teknis yang rumit seperti "pembangunan partisipatif" atau "perencanaan strategis", dan menggantinya dengan pertanyaan seperti: "Menurut Bapak/Ibu, bagaimana desa ini bisa lebih maju?" atau "Biasanya kalau ada pembangunan, siapa yang ikut mengerjakan?". Hal ini sangat membantu dalam menggali pendapat dan pengalaman mereka secara jujur dan terbuka.

Untuk memastikan keaslian data, saya mencatat hasil wawancara secara langsung dan, dengan izin narasumber, saya juga merekam percakapan menggunakan perekam suara. Karena beberapa warga merasa kurang percaya atau canggung jika diwawancarai secara resmi, saya membiarkan suasana tetap santai agar proses penggalian informasi berjalan alami.

Kendala utama yang saya hadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan perangkat desa terhadap peran mereka dalam pembangunan desa. Sebagian besar dari mereka menganggap pembangunan sebagai urusan pemerintah desa semata, bukan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam setiap wawancara, saya juga mencoba menanamkan pemahaman dasar bahwa pembangunan desa membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya perangkat desa.

Melalui teknik pendekatan yang bersahabat dan penggunaan bahasa yang mudah dicerna, wawancara berjalan dengan cukup baik meskipun memerlukan waktu dan kesabaran ekstra. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat dengan SDM rendah, metode komunikasi yang tepat dan empati terhadap kondisi sosial sangat penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan

c. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data, diperlukan dokumen pendukung yang sesuai. Data yang diperoleh dapat diverifikasi dengan bantuan dokumentasi. Dokumentasi, menurut Masrohati (2020), adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan laporan, dokumen, atau bahan-bahan tertulis seperti pedoman dan aturan yang berkaitan dengan fokus studi dan penelitian.

F. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian kualitatif bertujuan memastikan keabsahan dan akurasi data yang dihasilkan selama proses penelitian. Teknik yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

Uji reliabilitas menentukan seberapa konsisten data yang dikumpulkan pada prosedur penelitian yang berbeda. Metode ini digunakan untuk mengurangi kesalahan penelitian dengan cara berbicara dan berkonsultasi dengan orang yang memiliki pengetahuan, yaitu dosen pembimbing (Prastowo, 2012).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan selama dan setelah fase pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), ada tiga aktivitas utama yang terlibat dalam analisis data kualitatif.

a. Reduksi Data (Reduksi Data)

Reduksi data mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk menyempurnakan dan mengatur data awal yang dikumpulkan dari investigasi. Menemukan informasi yang berguna dan menghilangkan detail yang tidak relevan adalah tujuan dari fase ini. Reduksi dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelahnya untuk memastikan fokus pada tema atau kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Tampilan Data (Penyajian Data)

Penyajian data melibatkan pengorganisasian data dalam bentuk yang memungkinkan interpretasi dan pemahaman yang lebih mudah, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, atau matriks. Dengan menyajikan data, peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan tren yang menyederhanakan kesimpulan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Selama fase ini, kesimpulan dibuat dengan menggunakan data yang telah diringkas dan disajikan. Melalui triangulasi, pengecekan ulang, atau perbandingan dengan data lain, kesimpulan awal dibuat secara teratur selama proses penelitian untuk memastikan keakuratannya.

BAB III

PROFIL DESA SEMANTUN, KECAMATAN JELAI HULU, KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT

A. Sejarah Desa Semantun

Secara historis terbentuknya Desa Semantun telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu oleh komunitas masyarakat adat Dayak yang berasal dari Kecamatan Marau. Desa ini merupakan hasil dari persebaran penduduk Kecamatan Marau yang pada akhirnya mengarah pada pemekaran kecamatan. Hasil dari pemekaran tersebut membuat terbentuknya Kecamatan Jelai Hulu. Desa Semantun merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jelai Hulu. Kata "Semantun" diambil dari nama sungai yang mengalir sepanjang Desa Semantun. Pada awalnya Semantun hanya berstatus sebagai dusun dan merupakan bagian dari wilayah Desa Biku Sarana yang terbagi jadi 3 dusun yaitu Dusun Semantun, Dusun Peringkunyit, dan Dusun Bayam.

Pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Ketapang Nomor 93 Tahun 2004 Dusun Semantun resmi dimekarkan menjadi sebuah Desa. Kepala Desa pertama Desa Semantun yaitu bernama Petrus Nikat yang dilantik pada tahun 2006. Kepala Desa yang kedua bernama Jartop yang menjabat selama 2 periode pada tahun 2012. Kepala Desa Semantun sekarang bernama Yulia Birce Gelu Koban. Wilayah Desa Semantun mencakup 3 dusun yaitu Dusun Semantun, Dusun janda Berias, dan Dusun Pembangunan Kinjil.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Desa adalah pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana program dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa.

Visi kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penetapan visi kepala desa sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa merupakan langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Visi dan misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2024 sampai dengan 2029 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Semantun, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Selain itu, pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten juga diperhatikan.

Visi kepala desa Tahun 2024-2029 ini disusun dengan memperhatikan atau mengacu pada visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023, yakni: “Mewujudkan desa yang transparan, demi terciptanya desa yang maju, sejahtera, dan berbudaya”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Visi Desa Semantun Tahun 2024-2029 adalah: “Mewujudkan desa yang transparan, demi terciptanya desa yang maju, sejahtera, dan berbudaya”.

Misi Kepala Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan visi Kepala Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan Kepala Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Kepala Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2029 adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik yang cepat dan tepat.
- b. Pengelolaan keuangan desa yang transparan.
- c. Memperhatikan lingkungan hidup dan sekitarnya.
- d. Peningkatan sumber daya manusia, baik itu di kaum perempuan, karang taruna, agama, dan seluruh lembaga.
- e. Ikut berpartisipasi dalam suka dan duka.

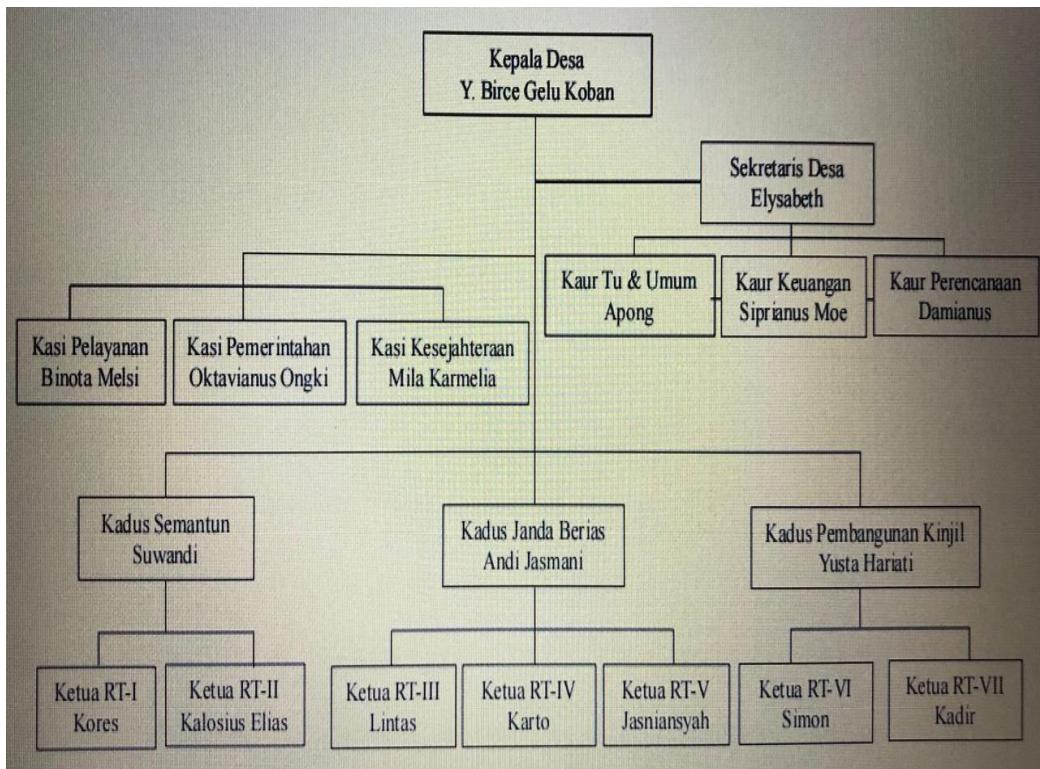
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semantun Jaya

Struktur Pemerintahan Desa Semantun terdiri dari :

1. Kepala Desa Semantun : Y. Birce Gelu Koban
2. Sekretaris Desa Semantun : Elysabeth
3. Kepala Urusan
 - a. Kaur Tata Usaha Dan Umum : Apong
 - b. Kaur Keuangan : Siprianus Moe
 - c. Kaur Perencanaan : Damianus
 - d. Kasi Pemerintahan : Oktavianus Ongki
4. Kepala Seksi

- a. Kasi Pelayanan : Binota Melsi
 - b. Kasi Pemerintahan : Oktavianus Ongki
 - c. Kasi Kesejahteraan : Mila Karmelia
5. Kepala Dusun
- a. Kepala Dusun Semantun : Suwandi
 - b. Kepala Dusun Janda Berias : Andi Jasmani
 - c. Kepala Dusun Pembangunan Kinjil : Yusta
6. Ketua RT
- a. Ketua RT 1 : Kores
 - b. Ketua RT 2 : Kalosius Elias
 - c. Ketua RT 3 : Lintas
 - d. Ketua RT 4 : Karto
 - e. Ketua RT 5 : Jasniansyah
 - f. Ketua RT 6 : Simon
 - g. Ketua RT 7 : Kadir

Gambar 3.1 Struktur Desa Semantun Jaya



Sumber :Data Profil Desa, Tahun 2024

Keterangan:

Pemerintah Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun (Kadus), dan Ketua RT. Masing-masing unsur memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

1. **Kepala Desa** : Merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa juga berwenang

menetapkan kebijakan, mengambil keputusan strategis, serta menjalin koordinasi dengan pihak kecamatan dan lembaga lainnya.

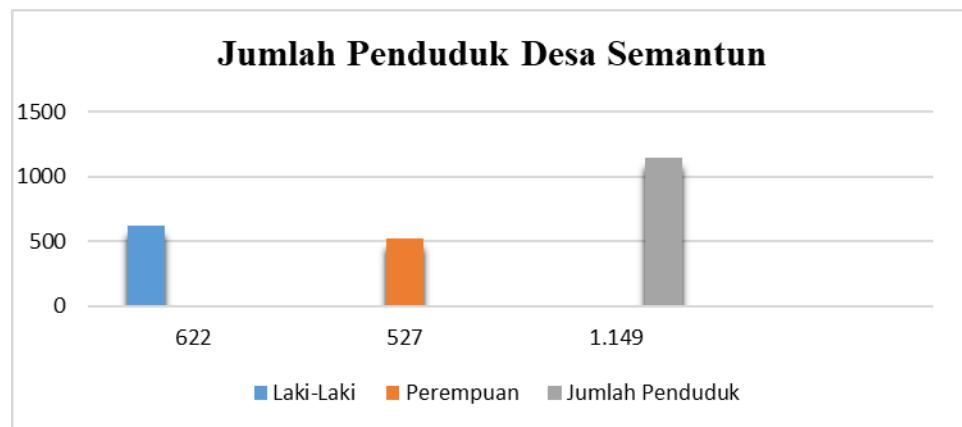
2. Sekretaris Desa : Memiliki tugas utama dalam hal administrasi pemerintahan desa. Sekretaris Desa bertanggung jawab menyusun laporan kinerja dan keuangan desa, mengelola dokumen dan arsip, serta membantu Kepala Desa dalam penyusunan peraturan dan kebijakan administratif.
3. Kasi Pelayanan : Bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sosial.
4. Kasi Pemerintahan : Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa termasuk ketertiban umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
5. Kasi Kesejahteraan : Bertugas menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sosial, ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
6. Kaur Tata Usaha dan Umum : Bertugas mengelola administrasi surat menyurat, arsip, dan dokumentasi kegiatan desa.
7. Kaur Keuangan : Berperan penting dalam pengelolaan anggaran, mencatat transaksi keuangan desa, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
8. Kaur Perencanaan : Bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes dan RKPDes, serta melakukan monitoring dan evaluasi program.
9. Kepala Dusun (Kadus) : Merupakan perpanjangan tangan Kepala Desa di wilayah dusun masing-masing. Kepala Dusun bertugas melakukan pembinaan terhadap masyarakat, menyampaikan informasi dari pemerintah desa, serta membantu pelaksanaan program kerja desa di

tingkat dusun. Kaepala Dusun juga mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Ketua RT dan masyarakat setempat.

10. Ketua RT (Rukun Tetangga) : Berperan sebagai pelaksana pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Tugas utama Ketua RT meliputi pendataan penduduk, menyampaikan informasi dari pemerintah desa, membantu pelaksanaan kegiatan sosial dan keamanan lingkungan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Desa Semantun terletak di Kecamatan Jelai Hulu dan merupakan desa dengan wilayah terluas di kecamatan tersebut. Luas wilayah Desa Semantun tercatat mencapai 15.519,85 hektare, menjadikannya wilayah terluas dibandingkan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Jelai Hulu. Potensi ini menjadikan Desa Semantun sebagai wilayah yang strategis untuk pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa Semantun sebagai berikut :

Gambar 3. 4 Grafik Jumlah Penduduk



Sumber: Data Profil Desa, Tahun 2024.

D. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Keadaan Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk Desa Semantun berasal dari suku Dayak (98%), sementara sisanya terdiri atas suku Melayu dan Jawa (2%). Mayoritas penduduk Desa Semantun adalah suku Dayak. Oleh karenanya sebagian besar masyarakat menganut agama Nasrani (97%), sedangkan 3% lainnya beragama Islam. Dalam hal budaya, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tradisi suku Dayak. Adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun masih dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman hidup. Masyarakat setempat berupaya secara konsisten melestarikan budaya serta adat istiadat yang dimiliki, termasuk menjadikan hukum adat sebagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Kondisi Infrastruktur Desa Semantun memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Semantun menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebanyak 12,9% tidak tamat SD, sedangkan sebanyak 42,8% penduduk telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), sementara 17,8% berhasil menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Namun ada 10,9% tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Kemudian, ada 7% penduduk yang berhasil tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sedangkan sebanyak 6% tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Selanjutnya, sebanyak 3% penduduk mencapai tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Selengkapnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 5 Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD	77	60	231
2	Tamat SD	215	236	451
3	Tidak Tamat SLTP	86	28	114
4	Tamat SLTP	104	83	187
5	Tidak Tamat SLTA	29	40	69
6	Tamat SLTA	47	26	73
7	Tamat Akademik/PT	15	9	24
Jumlah		573	482	1.149

Sumber :Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan masyarakat Desa Semantun tidak tamat SD 231 mayoritas menempuh tamatan SD dengan memperoleh tertinggi sejumlah 451. Kemudian tamatan SLTP dengan jumlah 187. Sedangkan tamatan SLTA sejumlah 73. Setelah itu tidak tamat SD sejumlah 137, kemudian disusul tidak tamat SLTP sejumlah 114, lalu tidak tamat SLTA sejumlah 69 dan untuk tamatan Akademik/PT sejumlah 24. Secara keseluruhan sebanyak 1.149. Data ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah hingga menengah dengan jumlah yang relatif sedikit untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sebagian yang lulusan perguruan tinggi dari Desa Semantun tidak tinggal di desa tersebut karena berbagai faktor yang berkaitan dengan kesempatan kerja, fasilitas, dan gaya hidup. Banyak sebagian yang telah lulus memilih untuk mencari pekerjaan di kota atau daerah lain yang memiliki lebih banyak peluang kerja sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Semantun untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 3. 6 Indikator Kesehatan

Uraian	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	1	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	185	190	180
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber :Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat simpulkan bahwa menunjukkan layanan kesehatan ibu dan anak cukup baik dalam tiga tahun terakhir. Tenaga kesehatan selalu menangani balita dan tidak ada kasus kematian ibu melahirkan maupun gizi buruk. Namun, angka kematian bayi sempat muncul satu kasus pada tahun 2023, dan cakupan imunisasi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Meskipun sebagian besar indikator positif, evaluasi terhadap imunisasi dan kematian bayi tetap diperlukan untuk peningkatan layanan kesehatan

Jumlah penduduk Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, berdasarkan data profil desa tahun 2024 sebesar 1.149 jiwa yang terdiri dari 622 laki-laki dan perempuan 527 jiwa sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7 Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0-4	51 Jiwa	52 Jiwa	103 Jiwa	8,9 %
2	5-9	36 Jiwa	38 Jiwa	74jiwa	6,4 %
3	10-14	45 Jiwa	40 Jiwa	85 Jiwa	7,3 %
4	15-19	50 Jiwa	59 Jiwa	109 Jiwa	9,5 %
5	20-24	90 Jiwa	71 Jiwa	161 Jiwa	14,1 %

6	25-29	60 Jiwa	60 Jiwa	120 Jiwa	10,5 %
7	30-34	55 Jiwa	31 Jiwa	86 Jiwa	7,5 %
8	35-39	46 Jiwa	26 Jiwa	72 Jiwa	6,3 %
9	40-44	46 Jiwa	30 Jiwa	76 Jiwa	6,6 %
10	45-49	38 Jiwa	31 Jiwa	69 Jiwa	6 %
11	50-54	30 Jiwa	30 Jiwa	60 Jiwa	5,3 %
12	55-59	34 Jiwa	26 Jiwa	60 Jiwa	5,3 %
13	60-64	21 Jiwa	12 Jiwa	33 Jiwa	2,8 %
14	65+	20 Jiwa	21 Jiwa	41 Jiwa	3,5 %
Jumlah		622 Jiwa	527 Jiwa	1.149 Jiwa	100 %

Sumber :Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan data yang terbaru, pada tahun 2024 penduduk terbanyak berdasarkan faktor usia adalah usia 20-24 tahun yang berjumlah sebanyak 161 jiwa dengan persentase 14,1%. Untuk jumlah paling sedikit pada usia 60-64 sebanyak 33 jiwa dengan persentase 2,8%. Secara keseluruhan laki-laki 622 jiwa sedangkan perempuan 527 jiwa. Jadi keseluruhannya 1.149 jiwa dengan persentase 100%. Secara umum, populasi didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama di rentang 15-34 tahun. Jika dilihat dari pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan, bisa di lihat tabel berikut ini :

Tabel 3. 8 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	171	152	240	196	462	375	8,56
Angkatan Kerja	240	129	260	136	523	275	4,7
Mencari Kerja	90	78	106	118	191	203	3,95

Sumber: Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, dapat diuraikan bahwa terjadi pada peningkatan jumlah usia kerja, angkatan kerja, dan pencari kerja dari 2021 hingga 2023. Usia kerja bertambah signifikan, diikuti dengan kenaikan angkatan kerja dan pencari kerja. Persentase kenaikan keseluruhan usia kerja mencapai 8,56%, angkatan kerja naik 4,7%, dan pencari kerja 3,95%. Hal ini mencerminkan pertumbuhan tenaga kerja serta tantangan dalam penyediaan lapangan kerja.

2. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Semantun sejumlah 132 KK, yang tersebar hampir merata di 3 (tiga) dusun.

Tabel 3. 9 Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	40 KK	38 KK	38 KK
Hampir Miskin	98 KK	97 KK	98 KK
Miskin	128 KK	131 KK	130 KK
Kaya	2 KK	4 KK	5 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
Jumlah	268 KK	270 KK	271 KK

Sumber: Data Profil Desa, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa data tersebut menunjukkan jumlah KK meningkat dari 268 pada tahun 2022 menjadi 271 pada tahun 2024. Jumlah KK sangatmiskin sedikit menurun, sementara kategori miskin dan hampir miskin relatif stabil. Jumlah KK kaya bertambah dari 2 menjadi 5. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi mengalami sedikit

perbaikan, tetapi sebagian besar KK masih berada dalam kategori miskin dan hampir miskin.

Sebagian besar pendapatan masyarakat di daerah ini bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian, dengan tingkat pendapatan yang umumnya berada di bawah rata-rata. Sebanyak 70% penduduk menggantungkan mata pencaharian mereka sebagai petani karet. Pada musim hujan, sebagian masyarakat juga beralih mengelola lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, sekitar 20% penduduk bekerja di sektor lain seperti menjadi karyawan perusahaan, pedagang, atau pegawai negeri sipil (PNS). Adapun 10% sisanya tidak memiliki pekerjaan tetap atau tergolong sebagai pengangguran. Kehadiran ini menunjukkan adanya ketergantungan yang besar pada sektor primer dengan variasi lapangan pekerjaan yang masih terbatas.

E. Potensi Desa Semantun

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Semantun terdapat berbagai potensi meliputi:

1. Sumber Daya Alam

Salah satu potensi sumber daya alam di Desa Semantun adalah di bidang pertanian dan perkebunan karet serta hortikultura. Karena sebagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani, maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat setempat. Selain itu lahan perkebunan yaitu karet dan hortikultura dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga. Dari segi potensi perikanan, Desa Semantun mempunyai wilayah tangkapan ikan berupa sawah yang berubah fungsi sebagai daerah tangkapan ikan darat ketika musim penghujan, dan sebagian melalui sungai.

2. Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia di Desa Semantun dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju. Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian. Jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di Desa Semantun adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti petani, pedagang, pekebun, dan lain-lain.

3. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan di Desa Semantun tahun 2024-2029 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, di samping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa. Potensi pembangunan di Desa Semantun adalah pembangunan jalan dan jembatan pertanian di wilayah yang paling besar dengan potensi pertanian dan perikanan. Potensi pembangunan yang tidak kalah adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

4. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya di Desa Semantun adalah sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumber daya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu

wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

5. Kelembagaan

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah desa.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Desa Semantun Jaya menunjukkan adanya keterlibatan aktif, meskipun belum sepenuhnya merata. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menyuarakan aspirasi mereka melalui forum-forum resmi seperti Musyawarah Desa (Musdes), yang menjadi wadah utama dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Keberadaan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para kepala dusun, tokoh adat, serta perangkat desa lainnya menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah desa. Namun, partisipasi ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan kepercayaan terhadap aparat desa. Dalam wawancara dengan Bercie, selaku Kepala Desa Semantun Jaya, ia menyampaikan: Bercie Galu Koban :

"Kami selalu mengundang masyarakat untuk ikut dalam musyawarah desa, terutama saat penyusunan RKPDes. Biasanya dilakukan secara terbuka, di balai desa atau rumah adat. Kami sampaikan program-program yang akan dijalankan, dan masyarakat dipersilakan memberi saran atau keberatan. Tapi memang tidak semua hadir, apalagi kalau hujan atau ada kegiatan ladang."(Wawancara 3 Februari 2025).

Wawancara ini kemudian ditanggapi oleh Elysabeth, selaku Sekretaris Desa, yang menambahkan:

"Benar, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah kami dorong. Tapi masih ada yang merasa bahwa keputusan itu urusan perangkat desa saja. Padahal, kami selalu bilang, kami butuh

suara masyarakat. Kami mencatat semua usulan, dan dibawa ke forum lebih lanjut.”**(Wawancara 3 Februari 2025).**

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa sudah membuka ruang partisipasi, namun belum semua warga memanfaatkannya secara optimal. Faktor keterbatasan informasi dan budaya diam dalam masyarakat adat menjadi tantangan tersendiri. Hal ini juga diamini oleh Kristo, Ketua BPD, yang merupakan ujung tombak pengawasan dan penampung aspirasi warga.

“BPD punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi warga. Kami juga turun ke dusun-dusun sebelum Musdes digelar. Tapi sering kali warga hanya bilang, ‘terserah saja, yang penting dibangun’. Itu menunjukkan bahwa belum semua merasa penting ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.”**(Wawancara 5 Februari 2025).**

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kendala utama bukan pada akses terhadap forum, melainkan pada tingkat kesadaran dan pola pikir masyarakat yang masih pasif. Maka dari itu, pendekatan budaya juga diperlukan dalam menghidupkan partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Yusta, selaku Kepala Dusun.

“Kalau kami di dusun, kami biasa kumpul dulu dengan warga sebelum musyawarah desa. Saya sampaikan program-program dari desa, lalu kami diskusi. Tapi jujur saja, kadang warga sungkan bicara kalau ada orang dari luar dusun atau dari kabupaten. Jadi mereka diam saja.”**(Wawancara 8 Februari 2025).**

Dalam konteks masyarakat adat seperti di Semantun Jaya, keberadaan tokoh adat masih sangat dihormati. Maka tokoh adat seperti Blasius Sudik memainkan peran penting dalam menjembatani pemikiran masyarakat dengan sistem pemerintahan desa yang lebih formal.

"Kalau soal keputusan besar, masyarakat biasanya minta pendapat dulu dari tetua adat. Kita duduk di rumah panjang, kita bahas bersama. Jadi, ketika masuk ke forum desa, mereka sudah tahu apa yang mau disampaikan. Tapi memang, tidak semua usulan bisa langsung diterima." **(Wawancara 8 Februari 2025)**.

Sementara itu, suara dari masyarakat umum disampaikan oleh Kartio, salah satu warga, yang memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap pengambilan keputusan di desa.

"Saya pernah ikut musyawarah desa, waktu itu soal jalan usaha tani. Saya sampaikan pendapat, dan ternyata diterima. Tapi ya tidak semua orang mau bicara. Banyak yang pikir, 'kalau kita bicara pun belum tentu didengar'. Tapi menurut saya, kalau tidak bicara, ya makin tidak didengar." **(Wawancara 10 Februari 2025)**.

Komentar Kartio menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap efektivitas suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, transparansi dan tindak lanjut dari usulan warga menjadi kunci agar partisipasi masyarakat tetap tumbuh. Hal ini juga diungkapkan oleh Lena, seorang ibu rumah tangga di desa tersebut.

"Kami ibu-ibu juga diundang kalau ada Musdes. Tapi banyak dari kami bingung harus bicara apa. Kadang takut salah ngomong. Tapi saya senang kalau usulan dari perempuan juga didengar. Seperti waktu kami minta PAUD dibantu, akhirnya dimasukkan juga dalam program." **(Wawancara 12 Februari 2025)**.

Pernyataan Lena menggarisbawahi pentingnya inklusi gender dalam pengambilan keputusan, serta perlunya pendampingan dan pemberdayaan agar semua lapisan masyarakat merasa memiliki ruang yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai tokoh di Desa Semantun Jaya, penulis menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah mengalami kemajuan meskipun belum

optimal. Pemerintah desa, terutama Kepala Desa dan Sekretaris Desa, telah membuka ruang seluas mungkin bagi warga untuk menyampaikan pendapat melalui Musyawarah Desa (Musdes) maupun pertemuan-pertemuan tingkat dusun. Namun, keterlibatan ini masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya keraguan sebagian warga untuk mengemukakan pendapat secara langsung, terutama dari kalangan perempuan dan masyarakat yang merasa tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Penulis juga mencatat bahwa keberadaan lembaga desa seperti BPD dan tokoh-tokoh adat memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Fungsi BPD sebagai penampung aspirasi warga serta tokoh adat yang memiliki pengaruh dalam komunitas lokal menjadi kekuatan dalam membangun partisipasi berbasis kearifan lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa proses perencanaan desa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan pemerintah desa. Budaya diam, sikap pasrah, dan minimnya kepercayaan terhadap efektivitas forum musyawarah menjadi kendala yang harus diatasi dengan pendekatan edukatif dan komunikasi yang lebih intensif.

Melalui temuan ini, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan di Desa Semantun Jaya bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta budaya lokal. Upaya mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan bermakna harus terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan masyarakat, transparansi informasi, maupun pelibatan tokoh informal. Keterlibatan aktif semua pihak, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, sangat penting agar kebijakan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Partisipasi bukan hanya soal hadir dalam forum, tetapi juga soal keberanian

menyampaikan suara dan komitmen bersama dalam menentukan arah pembangunan desa.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan di Desa Semantun Jaya menunjukkan dinamika yang beragam. Secara umum, terdapat semangat gotong royong yang masih hidup di kalangan warga, khususnya dalam kegiatan pembangunan fisik seperti jalan usaha tani, tandon air, dan sarana kebersihan. Namun, tidak semua masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang sama. Ada yang aktif terlibat, baik melalui swadaya tenaga maupun pemikiran, tetapi ada pula yang bersikap pasif, terutama karena kurangnya pemahaman, kesibukan pribadi, atau merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam proses awal perencanaan. Pemerintah desa menyadari hal ini dan terus mendorong pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Dalam wawancara dengan Bercie selaku Kepala Desa Semantun Jaya, ia menyampaikan:

“Kami selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya waktu pembangunan jalan rabat beton dan jembatan di RT 006, banyak warga yang datang membantu tanpa diminta, karena mereka sadar pembangunan ini untuk kepentingan bersama. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, masih ada juga yang hanya menonton saja atau bahkan mengeluh tapi tidak mau terlibat.”**(Wawancara 3 Februari 2025).**

Melengkapi pernyataan kepala desa, Elysabeth selaku Sekretaris Desa juga menambahkan:

“Kami selalu menyampaikan undangan gotong royong melalui kepala dusun dan RT. Beberapa warga sangat antusias, terutama kalangan tua dan laki-laki yang masih kuat secara fisik. Namun, kalangan muda sekarang agak sulit diajak, mungkin karena lebih sibuk kerja di luar atau kurang peduli. Padahal, partisipasi dalam bentuk kehadiran saja sudah sangat berarti bagi kami.”(**Wawancara 3 Februari 2025**).

Partisipasi juga menjadi perhatian Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam wawancara dengan Kristo selaku Ketua BPD, ia menegaskan pentingnya kontrol sosial:

“Kami di BPD ikut mengawasi jalannya pembangunan dan memastikan bahwa warga tahu dan dilibatkan. Tapi kenyataannya ya, masih ada gap. Ada warga yang merasa pembangunan hanya urusan pemerintah desa, padahal justru mereka yang seharusnya ikut aktif. Kami juga sempat usul agar setiap kegiatan fisik disertai dengan daftar hadir warga, supaya tahu siapa yang benar-benar peduli.”(**Wawancara 5 Februari 2025**).

Sementara itu, dari sisi pemerintahan tingkat dusun, Yusta selaku Kepala Dusun memberikan pandangannya:

“Saya biasanya menggerakkan warga lewat pendekatan pribadi. Kalau hanya lewat surat undangan kadang tidak ampuh. Tapi kalau saya turun langsung, datang ke rumah, biasanya mereka mau ikut. Pembangunan tandon air itu contohnya, warga RT 002 lumayan kompak karena saya aktif komunikasi langsung ke mereka.”(**Wawancara 8 Februari 2025**).

Dari sudut pandang adat, Blasius Sudik sebagai tokoh adat desa memberikan penekanan bahwa nilai gotong royong sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat:

“Zaman dulu, kalau ada bangun rumah atau jalan, semua turun tangan tanpa disuruh. Sekarang sudah mulai pudar. Tapi kalau dibarengi dengan doa adat atau kegiatan keagamaan, biasanya warga datang. Jadi, mungkin pemerintah bisa sinergi dengan tokoh adat

untuk membangkitkan semangat itu lagi.”(**Wawancara 8 Februari 2025**).

Sementara itu, dari kalangan masyarakat, pendapat Kartio dan Lena menunjukkan perbedaan tingkat partisipasi. Karto sebagai warga yang aktif menyatakan:

“Kalau saya, selama bisa, saya bantu. Saya ikut gotong royong karena memang itu penting untuk jalan ke ladang saya. Saya juga kasih sumbangan semen waktu itu. Tapi memang saya lihat, ada juga yang lewat saja, tidak peduli.”(**Wawancara 10 Februari 2025**).

Berbeda dengan Kartio, Lena sebagai warga yang cenderung pasif menjelaskan alasannya:

“Saya sebenarnya mau ikut, tapi sering tidak tahu kapan ada kegiatan. Kadang dikasih tahu mendadak atau cuma diumumkan lewat pengeras suara. Lagi pula saya sibuk jaga anak dan kebun, jadi ya belum sempat ikut. Tapi kalau untuk urusan lingkungan, saya tetap dukung.”(**Wawancara 12 Februari 2025**).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh di Desa Semantun Jaya, penulis menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang mulai tumbuh, meskipun belum merata. Kepala desa dan perangkatnya telah berusaha menciptakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan. Antusiasme sebagian warga dalam kegiatan gotong royong menjadi bukti bahwa partisipasi bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga sudah mulai menjadi praktik nyata di lapangan. Hal ini mencerminkan bahwa nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial masih memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat desa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat partisipasi masyarakat berbeda-beda. Wawancara dengan sekretaris desa dan kepala dusun menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan muda yang cenderung kurang terlibat. Hambatan komunikasi, informasi yang kurang merata, serta kesibukan pribadi menjadi alasan utama warga pasif. Perbedaan ini menandakan bahwa strategi pendekatan yang digunakan selama ini belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat, dan perlu adanya inovasi dalam pola komunikasi serta pelibatan warga agar mereka merasa lebih dilibatkan secara langsung.

Sementara itu, pandangan dari Ketua BPD dan tokoh adat memperlihatkan pentingnya fungsi kontrol sosial dan peran budaya lokal dalam menumbuhkan semangat kebersamaan. Partisipasi dalam pelaksanaan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kultural. Jika nilai adat, agama, dan budaya dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, maka semangat kolektif masyarakat dapat lebih kuat lagi. Tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin informal lainnya dapat menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun kesadaran bersama.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa meskipun partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Semantun Jaya sudah berjalan, upaya peningkatan partisipasi masih sangat dibutuhkan. Pemerintah desa perlu terus memperkuat pendekatan partisipatif yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, serta melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terkecuali. Partisipasi yang aktif dan merata dari masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan desa yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil

pembangunan menunjukkan dinamika yang beragam, tergantung pada jenis pembangunan yang dilakukan dan kedekatan manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari warga. Secara umum, masyarakat mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga, menggunakan, dan merawat hasil pembangunan desa, seperti jalan usaha tani, tandon air, dan sarana pendidikan. Namun, tidak semua elemen masyarakat terlibat secara aktif. Ada sebagian yang masih bersifat pasif dan belum sepenuhnya merasa bertanggung jawab atas hasil pembangunan tersebut.

Dalam wawancara dengan Bercie, Kepala Desa Semantun Jaya, ia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan desa memang mulai terlihat meningkat.

"Kami lihat sekarang masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan jalan usaha tani untuk akses kebun dan hasil panen. Dulu, waktu belum ada jalan itu, banyak warga kesulitan. Tapi setelah dibangun, mereka mulai sadar pentingnya menjaga supaya jalan itu jangan cepat rusak." **(Wawancara 3 Februari 2025).**

Ia menambahkan bahwa pemerintah desa juga sering mengingatkan warga melalui pertemuan dusun agar sama-sama merasa memiliki atas fasilitas yang dibangun.

"Tapi memang belum semua aktif. Ada juga yang cuek, padahal mereka juga yang pakai. Ini yang masih terus kami bina." **(Wawancara 3 Februari 2025).**

Elysabeth, Sekretaris Desa, menguatkan pernyataan kepala desa.

"Contohnya tandon air yang dibangun di RT 02. Beberapa warga sudah mengatur jadwal penggunaan air supaya tidak rebutan dan bisa bergiliran, tapi masih ada juga yang memakai seenaknya. Kami sudah

pasang papan informasi dan himbauan supaya dijaga bersama." **(Wawancara 3 Februari 2025).**

Ia menjelaskan bahwa perlu ada edukasi berkelanjutan agar rasa memiliki tumbuh dari dalam, bukan sekadar karena diminta oleh perangkat desa.

Kristo, Ketua BPD, menyoroti pentingnya peran kelembagaan desa dalam mengawasi pemanfaatan hasil pembangunan.

"BPD punya tugas untuk menampung aspirasi warga dan menyampaikan evaluasi kepada pemerintah desa. Kami juga ikut memantau, terutama jika ada warga yang menyalahgunakan fasilitas, seperti membuang sampah sembarangan di saluran drainase." **(Wawancara 5 Februari 2025).**

Kristo menekankan bahwa masyarakat harus didorong untuk tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tapi juga aktif menjaga dan memberi masukan.

Sementara itu, Yusta, Kepala Dusun, menjelaskan bahwa di beberapa wilayah dusun, masyarakat lebih aktif karena merasa pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

"Di dusun kami, waktu jalan usaha tani selesai dibangun, warga langsung gotong royong buat saluran air di pinggir jalan, supaya kalau hujan nggak cepat rusak. Mereka sadar, kalau rusak, mereka sendiri juga yang rugi." **(Wawancara 8 Februari 2025).**

Namun, ia juga mencatat bahwa semangat gotong royong kadang menurun jika tidak ada inisiatif dari tokoh masyarakat atau kepala RT.

"Kalau tokoh masyarakatnya aktif, biasanya warga juga ikut. Tapi kalau diam saja, ya akhirnya tidak jalan." **(Wawancara 8 Februari 2025).**

Blasius Sudik, tokoh adat di desa, menambahkan pandangan dari sisi nilai dan budaya lokal.

"Kami punya nilai adat bahwa apa yang dibangun bersama harus dijaga bersama. Tapi anak-anak muda sekarang kadang kurang paham. Dulu, kalau ada bangunan umum, orang tua-tua langsung tanam simbol adat supaya dihormati. Sekarang agak longgar."(**Wawancara 8 Februari 2025**).

Ia menyarankan agar pemerintah desa melibatkan unsur adat dalam proses pemanfaatan, terutama untuk menanamkan rasa tanggung jawab kolektif. Dari sisi warga, pendapat beragam juga muncul. Kartio, salah satu warga yang sudah lama tinggal di desa, mengaku bahwa ia sangat terbantu dengan pembangunan yang ada.

"Saya bersyukur, jalan ke kebun sekarang bisa dilewati motor. Dulu kalau panen harus dipikul jauh. Tapi soal menjaga, saya kadang bingung mau ikut bagaimana. Saya biasa kerja sendiri."(**Wawancara 10 Februari 2025**).

Kartio menunjukkan sikap penerima manfaat, tapi belum terlibat aktif dalam kegiatan pemeliharaan. Sementara itu, Lena, warga muda yang aktif di kegiatan Posyandu, menyampaikan bahwa keterlibatannya tumbuh karena merasa dilibatkan sejak awal.

"Kami ibu-ibu diberi kesempatan pakai balai desa untuk Posyandu dan kegiatan PKK. Karena kami sering pakai, kami juga yang bersihkan. Jadi otomatis kami jaga baik-baik."(**Wawancara 12 Februari 2025**).

Partisipasi masyarakat Desa Semantun Jaya dalam pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan bahwa sebagian besar warga mulai menyadari pentingnya menjaga dan menggunakan fasilitas desa secara bersama-sama. Hasil pembangunan seperti jalan usaha tani, tandon air, dan balai desa telah

memberi dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga, sehingga memicu keterlibatan mereka dalam pemanfaatan. Hal ini terlihat dari adanya inisiatif warga dalam mengatur penggunaan air, membersihkan fasilitas umum, serta menjaga sarana yang sudah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik.

Namun demikian, partisipasi masyarakat belum merata di semua lapisan. Masih terdapat kelompok warga yang bersikap pasif, tidak ikut terlibat dalam menjaga atau merawat fasilitas desa meskipun mereka turut menggunakannya. Faktor seperti kurangnya pemahaman, minimnya inisiatif dari tokoh masyarakat, serta rendahnya rasa tanggung jawab kolektif menjadi penghambat utama. Di sisi lain, masyarakat yang merasa dilibatkan sejak awal pembangunan cenderung menunjukkan kepedulian dan komitmen lebih tinggi terhadap hasil yang mereka manfaatkan.

Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan, perlu ada upaya kolaboratif dari pemerintah desa, tokoh adat, dan lembaga desa lainnya. Edukasi terus-menerus, penguatan nilai-nilai gotong royong, serta pelibatan generasi muda menjadi kunci agar hasil pembangunan tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga dijaga bersama. Dengan begitu, pembangunan desa tidak berhenti pada hasil fisik semata, tetapi juga membentuk masyarakat yang mandiri, peduli, dan bertanggung jawab.

4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dokumen perencanaan pembangunan

pembangunan desa di Desa Semantun Jaya masih berjalan secara bertahap. Evaluasi umumnya dilakukan melalui forum musyawarah desa tahunan, di mana perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

tokoh masyarakat, dan perwakilan dusun hadir untuk membahas capaian program, hambatan, serta perencanaan ke depan. Namun, tidak semua masyarakat hadir atau menyampaikan pendapatnya secara aktif. Sebagian besar evaluasi masih didominasi oleh perangkat desa dan perwakilan kelembagaan formal.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bercie, Kepala Desa Semantun Jaya, beliau menjelaskan:

"Setiap akhir tahun kami selalu mengadakan musyawarah untuk evaluasi kegiatan, termasuk penggunaan dana desa. Kami undang semua RT, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan juga. Tapi yakadang yang datang itu-itu saja. Hanya sebagian yang benar-benar aktif kasih masukan atau kritik." **(Wawancara 3 Februari).**

Hal ini juga ditegaskan oleh Elysabeth, selaku Sekretaris Desa:

"Kami selalu buat laporan pertanggungjawaban secara terbuka, dan hasilnya kami tempelkan di papan informasi desa. Tapi masyarakat kadang kurang tertarik membaca atau ikut evaluasi. Kalau diminta pendapat, banyak yang bilang 'terserah saja Bu', atau 'sudah bagus kok'. Padahal kami harapkan ada kritik atau saran untuk lebih baik." **(Wawancara 3 Februari 2025).**

Berbeda halnya dengan pandangan dari Kristo, Ketua BPD, yang menekankan bahwa BPD aktif melakukan pengawasan dan turut mendorong masyarakat agar ikut mengevaluasi hasil pembangunan. Kristo (Ketua BPD):

"Kami dari BPD sudah berusaha turun ke masyarakat, kumpulkan pendapat soal hasil kegiatan yang sudah dijalankan. Misalnya pembangunan jalan, air bersih, atau bantuan sosial. Tapi respon masyarakat masih bervariasi. Ada yang antusias, ada yang cuek. Mungkin karena kurang paham fungsi evaluasi atau mereka merasa tidak punya hak bicara." **(Wawancara 5 Februari 2025).**

Sementara itu, Yusta, Kepala Dusun, menyampaikan bahwa kendala geografis dan kesibukan warga juga menjadi alasan partisipasi dalam evaluasi tidak merata. Yusta (Kepala Dusun):

"Kalau warga dusun kami, sebagian besar kerja di kebun. Jadi waktu musyawarah evaluasi itu banyak yang tidak bisa hadir. Tapi kami tetap coba sampaikan hasil evaluasi ke mereka secara lisan, walau tidak semua respon balik ke kami."(**Wawancara 8 Februari 2025**).

Menariknya, menurut Blasius Sudik, tokoh adat di desa tersebut, keterlibatan masyarakat bisa lebih aktif jika proses evaluasi dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan adat.

"Kalau evaluasi disampaikan dengan pendekatan adat, misalnya lewat pertemuan adat atau arisan kampung, masyarakat lebih mau bicara. Tapi kalau modelnya formal, banyak yang merasa malu atau takut salah."(**Wawancara 8 Februari 2025**).

Sementara itu, Kartio, seorang warga desa yang aktif dalam kegiatan sosial, menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya ingin terlibat, namun kadang tidak tahu bagaimana cara menyampaikan masukan.

"Saya pribadi ikut beberapa kali evaluasi desa. Tapi teman-teman saya banyak yang bingung mau komentar apa. Mereka takut dianggap mengkritik pemerintah desa. Padahal niatnya baik."(**Wawancara 10 Februari 2025**).

Berbeda dengan Lena, seorang ibu rumah tangga yang mengaku jarang mengikuti forum evaluasi.Lena (Warga):

"Saya tidak ikut rapat-rapat itu, soalnya saya tidak ngerti. Saya pikir itu urusan orang-orang penting saja. Kalau saya ditanya ya saya cuma bilang 'terima kasih sudah bangun jalan'. Saya tidak tahu harus nilai apa."(**Wawancara 12 Februari 2025**).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penulis melihat bahwa partisipasi masyarakat Desa Semantun Jaya dalam tahap evaluasi pembangunan masih belum merata dan cenderung bersifat formalitas bagi sebagian warga. Meskipun pemerintah desa, BPD, dan aparat dusun telah menyediakan ruang dan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan pendapat, kenyataannya hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif terlibat dan memberikan masukan yang konstruktif.

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian penting dari siklus pembangunan yang bersifat partisipatif. Masih ada hambatan psikologis, seperti rasa takut, tidak percaya diri, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai apa yang seharusnya mereka sampaikan dalam forum evaluasi. Selain itu, faktor sosial-budaya dan waktu pelaksanaan juga turut memengaruhi tingkat kehadiran masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di dusun yang jauh atau sibuk dengan kegiatan pertanian.

Namun demikian, partisipasi tidak bisa dipaksakan secara instan. Upaya yang sudah dilakukan oleh perangkat desa dan lembaga lokal, seperti pendekatan melalui jalur adat, penyampaian informasi secara langsung oleh kepala dusun, dan keterlibatan tokoh masyarakat, merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi dan dilanjutkan. Ke depan, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, atau dialog rutin agar warga lebih memahami arti penting evaluasi dan selanjutnya harus di dasari dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan karena dokumen perencanaan adalah tahapan awal dari pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan desa di Desa Semantun Jaya dilakukan secara bertahap dan partisipatif, dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan rencana kerja tahunan. Tahapan pertama diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang terdiri dari unsur perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya dilakukan pengkajian keadaan desa dengan menghimpun data tentang kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta potensi dan permasalahan yang ada di setiap wilayah dusun. Setelah itu, dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menjaring usulan langsung dari warga, yang kemudian dihimpun menjadi Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes).

Hasil dari Musdus dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPDes oleh tim penyusun. Rancangan ini kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) bersama BPD, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya untuk disepakati dan ditetapkan menjadi RKPDes final. Setelah RKPDes disahkan, pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat rencana keuangan untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses perencanaan ini juga memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes) yang memuat visi-misi kepala desa dalam periode enam tahunan. Seluruh dokumen perencanaan ini bersifat terbuka dan diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau sosialisasi langsung.

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan di Desa Semantun Jaya merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pembangunan desa. Tahapan evaluasi dilakukan setelah program-program dalam RKPDes dan APBDes dilaksanakan. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan secara berkala, baik di tengah pelaksanaan kegiatan (monitoring) maupun setelah kegiatan selesai (evaluasi akhir). Proses evaluasi diawali dengan pengumpulan data capaian fisik dan keuangan oleh perangkat desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK). Data tersebut kemudian dibahas dalam forum evaluasi desa, yang melibatkan BPD, perangkat desa,

pendamping lokal desa, serta masyarakat umum, termasuk tokoh pemuda, perempuan, dan kelompok marginal.

Masyarakat diberikan ruang untuk memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan program, termasuk menyampaikan keluhan, masukan, dan saran perbaikan terhadap rencana pembangunan ke depan. Evaluasi ini juga mencakup sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan dokumen perencanaan awal (RPJMDes dan RKPDes), serta sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan pada siklus perencanaan berikutnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam evaluasi tidak hanya menjadi bentuk kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana refleksi bersama untuk mendorong pembangunan desa yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.

B. faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Semantun Jaya

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adanya forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbang Desa, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan usulan program pembangunan. Keberadaan forum ini memberikan ruang demokratis bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, budaya gotong royong yang masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat juga menjadi pendorong penting. Budaya ini tercermin dalam semangat kerja sama dan solidaritas dalam kegiatan pembangunan,

seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat Desa Semantun Jaya juga memiliki tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan yang berperan aktif dalam mendorong warga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan desa, termasuk dalam proses perencanaan. Peran tokoh ini sangat signifikan karena mereka dipercaya dan memiliki pengaruh dalam komunitas.

Tidak hanya itu, keberadaan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes juga menjadi acuan penting yang memberikan kepastian arah pembangunan desa, sehingga masyarakat memiliki dasar dalam memahami dan menilai program-program yang dirancang oleh pemerintah desa. Di beberapa kesempatan, terdapat pula perangkat desa yang menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas, yang secara tidak langsung mendorong partisipasi warga karena merasa dihargai pendapat dan kontribusinya.

Namun demikian, di balik berbagai faktor pendukung tersebut, terdapat pula sejumlah hambatan yang cukup serius yang mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi sebagian besar masyarakat, yang menyebabkan banyak warga tidak memahami pentingnya perencanaan desa dan merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat dalam forum-forum resmi. Akibatnya, partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat pasif. Selain itu, keterbatasan dalam penyebarluasan informasi mengenai agenda musyawarah dan rencana pembangunan juga menjadi kendala. Informasi tidak selalu sampai ke semua dusun atau kelompok masyarakat, sehingga tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses perencanaan.

Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan adanya persepsi masyarakat bahwa proses pembangunan desa, terutama dalam hal distribusi pekerjaan atau proyek, cenderung tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu yang dekat dengan kepala desa. Kondisi ini menciptakan apatisme di kalangan masyarakat, karena mereka merasa suara dan partisipasi mereka tidak akan berpengaruh. Partisipasi masyarakat juga terhambat oleh minimnya ruang partisipatif yang benar-benar inklusif, di mana kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin sering kali tidak diberi ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, motivasi masyarakat dalam berpartisipasi sering kali didasarkan pada keuntungan langsung, seperti upah kerja atau bantuan proyek, bukan karena kesadaran kritis dan keinginan untuk membangun desa secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat instrumental dan belum sepenuhnya berkembang menjadi partisipasi yang aktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Semantun Jaya memerlukan upaya serius dalam membangun kepercayaan, meningkatkan akses informasi, memperluas pendidikan politik warga, serta menciptakan ruang partisipatif yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat Desa Semantunjaya menunjukkan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Desa. Keterlibatan ini mencakup usulan dan aspirasi yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes. Tata kelola pemerintahan desa juga dinilai cukup baik, ditandai dengan transparansi dalam proses perencanaan dan

penggunaan anggaran, serta pelibatan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh adat dan pemuda. Birce juga menyampaikan

“Kami dari masyarakat biasa dilibatkan dalam musyawarah desa. Di situ kami menyampaikan usulan kebutuhan warga. Setiap tahun, perangkat desa meminta masukan dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPDes. Selama ini cukup transparan, apalagi sekarang sudah ada papan informasi APBDes yang dipasang di balai desa. Tokoh adat dan pemuda juga sering diajak bicara, jadi menurut saya tata kelola pemerintahan sudah membaik.” **(Wawancara 3 Februari 2025)**

Di Desa Semantunjaya, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes dan Musrenbang Desa, meskipun tingkat partisipasi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti upah, motivasi pribadi, dan tingkat kesadaran warga. Pemerintah desa telah berupaya mendorong keterlibatan melalui sosialisasi, ajakan langsung oleh kepala dusun, dan pelibatan tokoh adat maupun pemuda. Dalam hal tata kelola, prinsip transparansi telah diterapkan, salah satunya dengan menampilkan informasi keuangan desa secara terbuka melalui papan infografis dan papan proyek. Lalu penyampaian Bercie di senada dengan apa yang di sampai kan oleh sekertaris desa yaitu Elysabeth beliau menyampaikan:

“Sebenarnya kalau RKP itu, kita libatkan masyarakat dari awal, mulai dari musdus sampai musdes. Kami dari pihak desa memang terus mengingatkan masyarakat agar ikut hadir, apalagi dalam musyawarah dusun atau desa. Meskipun begitu sebenarnya kalau RKP itu, kita libatkan masyarakat dari awal, mulai dari musdus sampai musdes.” **(Wawancara 3 Februari 2025)**

Dari penuturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa, terlihat bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKP Desa sudah dilakukan melalui forum musyawarah dan

mengoordinasikan aspirasi melalui RT, RW, dan lembaga desa lainnya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat interaksi yang lebih aktif dan merata. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap dokumen perencanaan desa, seperti RKP, serta persepsi yang salah mengenai prioritas pembangunan dan bentuk kegiatan, menjadi tantangan utama. Lalu di lanjut dengan penyampaian dari kepala Dusun yaitu Yusta mengatakan:

“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat penting, namun masih banyak yang kurang memahami RKP desa / mereka hanya tahu sebatas kebutuhan mereka, tapi tidak tahu proses penyusunannya.”**(Wawancara 8 Februari 2025)**

Pemerintah desa berusaha meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mengadakan musyawarah yang lebih terbuka mengenai penggunaan dana desa, namun transparansi yang terbatas dan kurangnya pengawasan dari masyarakat menjadi hambatan. Masyarakat masih merasa kurang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan perencanaan pembangunan, sehingga dibutuhkan upaya lebih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran mereka dalam tata kelola yang baik. namun nyatanya masyarakat desa lebih mementingkan kegiatan mereka masing-masing senada apa yang di sampai kan oleh Kristo selaku BPD Semantun Jaya beliau mengatakan:

“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa masih terbatas. Banyak yang hanya mengetahui kebutuhan mereka, namun tidak memahami bagaimana proses penyusunan RKP berjalan. Musyawarah memang ada, tapi partisipasi aktif dan transparansi dalam pengelolaan dana masih menjadi tantangan. Keterlibatan dokumen perencanaan mengacu pada proses di mana dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan (seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMD) yang melibatkan masyarakat luas.”**(Wawancara 5 Februari 2025)**

Keterlibatan dokumen perencanaan mengacu pada proses di mana dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan (seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMD) yang melibatkan masyarakat, pihak-pihak terkait, atau pemangku kepentingan dalam pembuatannya. Hal ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proyek pembangunan tersebut. Regina Celine Sasauw, Sofia Pangemanan, dan Donald Monintja (2020) mengidentifikasi bahwa tata kelola pemerintahan di desa perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi penggunaan dana desa dan akuntabilitas kemampuan kinerja perangkat desa. Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kartio selaku masyarakat setempat beliau bengatakan:

“Sejak saya tinggal di Desa Semantunjaya, saya merasa bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih terbatas. Biasanya, perencanaan pembangunan hanya dibahas dalam musyawarah desa, namun seringkali kami tidak diberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana dokumen perencanaan itu dibuat. Kadang-kadang kami hanya mendengar keputusan akhir, tanpa tahu bagaimana prosesnya. Mungkin, jika dokumen perencanaan diajukan lebih terbuka, kami bisa lebih aktif memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami sebagai desa.”**(Wawancara 10 Februari 2025)**

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Blasius Sudik selaku Mantan Ketua Demung Adat:

“Menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas dan cenderung kurang transparan, sehingga masyarakat belum merasa dilibatkan sepenuhnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.”(**Wawancara 8 Februari 2025**)

Lena , yang merupakan Masyarakat setempat, menyadari bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah desa untuk memperbaiki transparansi dalam menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas dan cenderung kurang transparan, sehingga masyarakat belum merasa dilibatkan sepenuhnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Lena juga mengatakan bahwa,

“bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah desa untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan dana desa, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal memberikan informasi yang lebih detail kepada masyarakat mengenai alokasi anggaran.”(**Wawancara 12 februari 2025**).

Hal senada juga disampaikan oleh Kartio tadi , yang merasa bahwa meskipun tata kelola desa mulai membaik, keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pemantauan proyek pembangunan masih kurang.

“Ia berharap ke depan pemerintah desa bisa lebih terbuka dan aktif melibatkan masyarakat, agar hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.”(**Wawancara 10 Februari 2025**).

Dari keseluruhan pandangan yang disampaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, tokoh adat, dan masyarakat, tentang Keterlibatan dokumen perencanaan dan Tata kelola yang baik dapat disimpulkan bahwa. Keterlibatan masyarakat Desa Semantunjaya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes dan RPJMDes menunjukkan adanya upaya partisipatif dari pemerintah desa, khususnya melalui forum

musyawarah seperti musdus dan musdes. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan, sebagaimana dibuktikan oleh perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat. Hal ini mencerminkan praktik perencanaan yang mulai mengarah pada pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas.

Namun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen masih bersifat formal dan belum sepenuhnya aktif atau merata. Banyak warga yang belum memahami isi, fungsi, dan proses pembuatan dokumen perencanaan desa, sehingga partisipasi mereka cenderung terbatas pada tahap pengumpulan aspirasi awal, bukan pada tahap pengambilan keputusan. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengetahui kebutuhan mereka secara individu, namun belum memahami bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan dalam rencana pembangunan desa secara keseluruhan.

Dari sisi tata kelola, pemerintah desa telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, misalnya dengan menyediakan papan informasi APBDes dan papan proyek. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat terkait proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini menyebabkan persepsi masyarakat bahwa keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih minim, dan transparansi belum sepenuhnya dirasakan.

Secara umum, tata kelola pemerintahan desa di Semantunjaya telah mengalami perbaikan dalam hal pelibatan dan transparansi masyarakat. Namun, untuk mencapai pemerintahan yang baik yang lebih ideal, masih diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman dokumen perencanaan, peningkatan komunikasi informasi, serta mekanisme

pengawasan yang lebih inklusif. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, dapat menjadi kunci untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, saya melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RKPDes dan RPJMDes masih bersifat formalitas. Masyarakat memang diundang untuk hadir dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa, tetapi banyak dari mereka yang merasa kecewa karena aspirasi yang mereka sampaikan dalam forum tersebut jarang sekali direalisasikan. Sebaliknya, yang justru direalisasikan dalam program pembangunan desa adalah hal-hal yang menurut masyarakat tidak terlalu penting atau hanya menguntungkan sebagian kecil pihak saja.

Kekecewaan ini berakumulasi dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya terhadap sistem tata kelola desa yang ada. Dalam praktiknya, masyarakat menilai bahwa hasil musyawarah hanya dijadikan formalitas administrasi, sementara keputusan akhir tetap ditentukan oleh kepala desa dan orang-orang terdekatnya. Hal ini menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam dokumen perencanaan tidak berdampak nyata dan hanya menjadi simbol partisipasi semu.

Pandangan ini sejalan dengan temuan Putri dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa dalam banyak desa di Indonesia, perencanaan pembangunan sering kali hanya bersifat top-down, meskipun prosedurnya terlihat partisipatif. Partisipasi warga hanya sebatas hadir dan menyampaikan aspirasi, tanpa jaminan bahwa masukan mereka akan masuk dalam dokumen

akhir atau diakomodasi dalam program. Yusuf (2022) juga mengungkapkan bahwa buruknya tata kelola desa dapat terlihat dari tidak sinkronnya antara hasil musyawarah dengan pelaksanaan di lapangan, yang biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kedekatan personal. Sementara itu, Lestari (2023) menyoroti pentingnya transparansi dan mekanisme umpan balik dalam perencanaan pembangunan desa. Menurutnya, jika tidak ada mekanisme untuk memberi tahu masyarakat alasan mengapa usulan mereka tidak dipilih, maka akan muncul apatisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Melihat realitas ini, saya menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam dokumen perencanaan di Desa Semantun Jaya belum dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemberian sistem perencanaan pembangunan desa agar benar-benar menjadi ruang dialog yang berfungsi, bukan sekadar kewajiban prosedural.

Dari keseluruhan pandangan yang disampaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, tokoh adat, dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan demokratis di desa, tantangan struktural dan sosial masih menjadi hambatan utama. Kepala Desa dan Sekretaris Desa menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta distribusi kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat, yang sejalan dengan teori *Rawls* dan *Sen* tentang keadilan sosial. BPD berperan dalam memastikan kebijakan yang adil dan transparan melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif, sebagaimana dipaparkan oleh *Habermas* dalam teori *deliberative democracy*. Di sisi lain,

tokoh adat menekankan pentingnya nilai-nilai gotong royong dalam menciptakan kohesi sosial dan pemerataan ekonomi, sesuai dengan konsep *social capital* yang diajukan oleh *Bourdieu*. Masyarakat, meskipun merasa ada kemajuan, masih mencatat adanya ketimpangan dalam distribusi program, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran desa, yang sesuai dengan pandangan *Young* tentang ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok marginal agar pemerataan ekonomi dan keadilan demokratis dapat terwujud secara lebih merata dan adil di tingkat desa.

Dalam pengamatan saya selama melakukan penelitian di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, saya melihat bahwa keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi masih menjadi persoalan serius yang belum terwujud secara merata. Keadilan ekonomi tampak dari ketimpangan distribusi peluang kerja dan proyek desa, di mana sebagian besar pekerjaan pembangunan maupun kegiatan desa lebih sering diberikan kepada pihak keluarga atau orang-orang dekat kepala desa. Masyarakat umum merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk ikut serta dalam kegiatan yang seharusnya terbuka untuk semua. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang makin terasa di tingkat lokal, karena hanya kelompok tertentu yang terus mendapat manfaat dari anggaran desa.

Selain itu, keadilan demokrasi pun belum sepenuhnya berjalan. Walaupun proses musyawarah desa dilakukan, namun keputusan yang diambil sering kali tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat. Hak-hak warga untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya hanya dijadikan formalitas. Banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan hal ini menciptakan apatisme terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Demokrasi

yang seharusnya membuka ruang partisipasi dan kesetaraan, justru dikendalikan oleh kekuasaan segelintir orang.

Dari kenyataan tersebut, saya menyimpulkan bahwa ketimpangan dalam keadilan ekonomi dan demokrasi di Desa Semantun Jaya menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Dibutuhkan upaya perbaikan sistem tata kelola desa, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat secara adil dan merata dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Semantun Jaya dalam pembangunan desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), masih berada pada taraf yang belum maksimal dan cenderung terbatas. Dalam tahap perencanaan, meskipun forum Musyawarah Desa (Musdes) telah dilaksanakan sebagai wadah partisipatif, kehadiran masyarakat tidak selalu mencerminkan keterlibatan aktif. Sebagian warga hadir hanya sebagai pendengar, tanpa memberikan kontribusi pemikiran atau usulan konkret. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan, dan persepsi bahwa pendapat masyarakat tidak akan berpengaruh pada hasil akhir. Selain itu, adanya kekecewaan masyarakat terhadap kepala desa yang dianggap memihak keluarga dalam pelaksanaan program juga menjadi hambatan serius dalam mendorong keterlibatan warga.
2. Pada tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat masih bersifat situasional dan tidak merata. Ada kalanya warga ikut serta sebagai tenaga kerja dalam pembangunan fisik desa, seperti pembuatan jalan dan saluran air, namun keterlibatan ini sering kali bergantung pada kedekatan mereka dengan pihak pemerintah desa. Ketimpangan dalam pembagian proyek, di mana pekerjaan sering kali hanya diberikan kepada kelompok tertentu atau keluarga kepala desa, membuat warga lain merasa termarginalkan dan enggan untuk ikut serta. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi partisipasi dalam pelaksanaan, tetapi juga

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan secara keseluruhan. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi telah menjadi penghambat kuat bagi partisipasi yang seharusnya bersifat inklusif dan adil.

3. Dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat telah mulai merasakan dampak dari program-program yang dilaksanakan. Namun demikian, partisipasi mereka dalam merawat, menjaga, dan mengoptimalkan penggunaan hasil pembangunan masih rendah. Masyarakat cenderung memanfaatkan fasilitas seperti jalan desa atau sarana air bersih, tetapi belum memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif belum menyentuh aspek tanggung jawab jangka panjang dari warga terhadap hasil pembangunan yang telah diraih bersama.
4. Sementara itu, pada tahap evaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat tergolong sangat minim. Evaluasi biasanya dilakukan secara formal oleh perangkat desa dan kelembagaan seperti BPD, namun keikutsertaan masyarakat dalam forum evaluasi atau penyampaian masukan belum berjalan dengan baik. Banyak warga yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi atau merasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap kegiatan desa. Padahal, evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus pembangunan untuk memastikan bahwa program yang telah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata. Kurangnya partisipasi dalam evaluasi menyebabkan proses perbaikan program desa berjalan lambat dan tidak berdasarkan umpan balik yang representatif dari warga.

5. Faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat di antaranya adalah keberadaan tokoh masyarakat yang aktif, struktur kelembagaan desa seperti BPD yang mulai menjalankan fungsi pengawasan, serta budaya gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat. Namun, faktor-faktor penghambatnya lebih dominan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses informasi, persepsi negatif terhadap transparansi pemerintahan desa, serta tidak meratanya distribusi peran dan manfaat dalam pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada tersedianya forum atau kesempatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa, kepercayaan sosial, dan pola komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Semantun Jaya perlu meningkatkan kualitas musyawarah desa (Musdes) dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, bukan sekadar kehadiran fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang lebih intensif sebelum pelaksanaan Musdes, menggunakan bahasa dan metode komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Perlu adanya penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan mengenai pentingnya peran serta dalam perencanaan dan pembangunan desa. Program pembinaan ini bisa dilakukan secara rutin dengan melibatkan pendamping desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agar masyarakat lebih memahami mekanisme pembangunan dan merasa berdaya untuk ikut terlibat.
3. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pembagian proyek dan kegiatan pembangunan. Praktik yang

mengutamakan keluarga atau kelompok tertentu harus dihentikan karena hanya akan merusak kepercayaan masyarakat dan memicu apatisme. Transparansi dalam perekutan tenaga kerja lokal dan pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat secara aktif.

4. Evaluasi pembangunan perlu dijadikan sebagai budaya baru yang melibatkan masyarakat secara luas. Pemerintah desa disarankan untuk membuat forum khusus evaluasi yang lebih terbuka, tidak kaku, dan bersifat dialogis. Evaluasi juga bisa dilakukan secara informal di tingkat dusun atau RT untuk menjangkau lebih banyak warga.
5. Perlu adanya strategi pendekatan sosial-budaya yang sesuai dengan karakter lokal masyarakat Dayak. Misalnya, pelibatan masyarakat melalui jalur adat atau kegiatan komunal seperti arisan, kerja bakti, atau acara keagamaan. Pendekatan ini dapat membangun rasa kepercayaan dan membuka ruang partisipasi yang lebih alami. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui Kepemimpinan yang Transparan dan Inklusif. Pemerintah desa perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan transparansi dalam setiap proses pembangunan. Kepala desa dan perangkatnya harus bersikap adil tanpa memihak, serta menghindari praktik nepotisme dalam pembagian pekerjaan atau program. Kepemimpinan yang inklusif akan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

C. Kelemahan Penelitian

1. Keterbatasan Wilayah Studi:

Fokus penelitian yang hanya dilakukan di satu desa membatasi generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan geografis berbeda.

2. Ketergantungan pada Narasi Pihak Pemerintah Desa:

Beberapa temuan masih didominasi narasi dari pihak perangkat desa, seperti kepala desa dan sekretaris desa, yang mungkin belum sepenuhnya mewakili suara kritis dari warga biasa.

3. Belum tergali secara mendalam dimensi partisipasi digital atau pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., & Riharjo, I. B. (2020). Proses Perencanaan Pembangunan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Aji, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 7, 17–22.
- Ariska. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Jambon Ponorogo). 101–184.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2, 165–14.
- Gustiman, Y. (2021). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan. *Juhanperak Ejournal.Uniks.Ac.Id*, 913–934.
- Hafrida, L., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Dikelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 507–527.
- Hamdan Maosul. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. *Repository.Unigal.Ac.Id*, 3668–3677.

Hasmarini Ariestin Waruwu. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Community Participation in Oversight of Village Funds in Gawu-Gawu Bouso Village, North Gunungsitoli District. *12(1), 161–170. https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415*

Irwan Irwan, Adam Latif, A. M. (2021). Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Jangka Panjang Sehingga Memerlukan Perencanaan Yang Tepat Dan Akurat . Yang Memungkinkan Masyarakat Banyak Berpartisipasi Langsung Di Dalam Proses. *Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan, 9(2), 5–8.*

Jenal Arifin, Wawan Risnawan, A. J. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa maruyungsari kecamatan padaherang kabupaten pangandaran. *Repository.Unigal.Ac.Id, 773–780.*

Jusman Iskandar. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19.*

Magdalena Lenama. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). *Jurnal Mitra Manajemen, 5, 36–816.*

Masruri. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Inovasi Penelitian, 1(6), 1171–1180.*

Masykur, M. I. (2021). Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada di Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang). *Eprints.Uty.Ac.Id.*

- Oscar Radyan Danar. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7.
- Prahmana. S, R. (2023). Kebijakan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal (Studi Di Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu-Bara). *Ilmu Administrasi Negara*.
- Rizand Fadjar Muhammad, MZ. Arifin, D. Z. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrasruktur Di Desa Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. *Journal Administrasi Publik*, 9(4), 5651–5663.
- Siti Hajar, Irwan Syari Tanjung, Yurisna Tanjung, Z. (2018).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, danR&D). *IkatanPenerbit Indonesia (IKAPI)*, 15.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, AR (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1 (1), 18–33.
<https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1 (1). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16194>
- Wardani, D. K., Ranika, R., & Utami, P. (2020). Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 35–50.

Peraturan dan Undang-Undang yang Tercantum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2022
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA 4.1

PANDUAN WAWANCARA

A. . PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Untuk Kepala Desa, Sekdes, BPD, Kadus:

1. Apakah pemerintah desa rutin melaksanakan musyawarah desa untuk menyusun RKPDes?
2. Siapa saja yang biasanya diundang dan hadir dalam musyawarah tersebut?
3. Bagaimana masyarakat memberikan usulan? Apakah dicatat dan diproses secara terbuka?
4. Apakah ada kelompok yang mendominasi proses musyawarah (misalnya keluarga pejabat, tokoh tertentu)?
5. Bagaimana respon masyarakat ketika usulannya tidak ditindaklanjuti?

Untuk Tokoh Adat dan Masyarakat:

1. Apakah Anda pernah hadir dalam musyawarah desa?
2. Apakah Anda merasa bebas untuk menyampaikan pendapat?
3. Apakah usulan Anda pernah diterima dan dijadikan program desa?

2. PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN

Untuk Perangkat Desa:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik (misalnya pengerjaan jalan, saluran air)?
2. Apakah ada sistem pembagian kerja yang adil?
3. Apakah proyek desa dikerjakan oleh warga secara bergilir atau diberikan kepada kelompok tertentu saja?

Untuk Masyarakat dan Tokoh Adat:

1. Apakah Anda pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa?
2. Apakah pekerjaan dalam pembangunan dibagi secara adil atau hanya diberikan pada orang-orang tertentu?
3. Apa yang membuat Anda mau/tidak mau ikut dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan?

3. PARTISIPASI DALAM PEMANFAATAN HASIL

Untuk Semua Informan:

1. Apakah Anda memanfaatkan hasil pembangunan desa seperti jalan, air bersih, jembatan?
2. Apakah masyarakat ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan tersebut?
3. Jika ada kerusakan, apakah masyarakat inisiatif memperbaiki atau menunggu dari pemerintah desa?
4. Apakah ada program pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran menjaga hasil pembangunan?

4. PARTISIPASI DALAM EVALUASI

Untuk Perangkat Desa dan BPD:

1. Bagaimana proses evaluasi pembangunan dilakukan?
2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam evaluasi tahunan atau akhir kegiatan?
3. Apakah masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kritik atau saran secara terbuka?
4. Apakah hasil evaluasi dijadikan bahan perbaikan di tahun berikutnya?

Untuk Masyarakat dan Tokoh Adat:

1. Apakah Anda pernah diminta memberi pendapat atau menilai program yang telah selesai?
2. Apakah Anda merasa pendapat Anda didengarkan dalam proses evaluasi?
3. Apa kendala yang membuat masyarakat jarang ikut dalam evaluasi?

2. Foto-Foto hasil Wawancara

	
Foto Dengan Ibu Kepala Desa Semantun Jaya, Ibu Bircie	Foto Bersama BPD Semantun Jaya, bapak Kristo
	
Foto Bersama Sekertaris Desa Ibu Elisabeth	Foto Bersama Ibu Kepala Dusun Ibu Yusta



Foto Bersama Masyarakat Ibu Lena

Foto Bersama Mntan Ketua Adat Dn Masyarakat,Bapak Blasius Sudik Dan Bapak Manyur



Foto Bersama Masyraat Bapa Kartio

3. Surat Balasan Penelitian Dari Desa Semantun Jaya



PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN JELAI HULU
DESA SEMANTUN

Alamat : Jln. Raden Cendaga Malim No.07 Desa Semantun Kode Pos 78876

Nomor : 37 /SMT-A.140/IV/2025
Lamp. :
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat tertanggal 13 Januari 2025, dengan permohonan ijin penelitian mahasiswa program Sarjana (S2) atas nama :

Nama : Natalia
No. Mhs. : 23610040
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik
Tempat : Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si

Dengan ini, Saya Kepala Desa Semantun, pada prinsipnya menyambut baik atas kepercayaan pihak Kampus "APMD" Yogyakarta yang memilih dan menjadikan Desa kami (Desa Semantun) untuk objek penelitian oleh salah satu Mahasiswa yang tertera diatas. Kami mengijinkan dan akan memfasilitasi Mahasiswa tersebut sesuai dengan data, fakta dan kemampuan SDM yang kami miliki.

Demikian surat balasan atas permohonan ijin dari pihak Kampus "APMD" Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Semantun, 08 April 2025
Kepala Desa Semantun



Y. BIRCE GELU KOBAN



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pengembangan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondowulan Yogyakarta 55215
Email: perpusapmd@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : NATALIA

Judul Makalah: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Tanggal pemeriksaan: 01 Juli 2025

Persentase plagiasi: 19 %

Petugas: Checked By:

Wiji Astuti 